



Keputusan Vietnam Bergabung Dalam *The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB)* and *21st Century Maritime Silk Road (MSR)* China

Vietnam's Decision to Join In The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR) China

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar sarjana sosial

oleh:

Lutfia Khorida

NIM 120910101084

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis;
2. Nabi Muhammad saw beserta para sahabat yang telah menuntun hidup penulis dengan berpedoman pada agama Islam;
3. Ibunda Zuhana dan Ayahanda Khamim Tohari yang selalu memberikan dorongan, motivasi serta doanya demi kelancaran hidup dan studi penulis;
4. Kakak-kakaku, Kholifatur Rosida dan Khanina El Faiza yang selalu memotivasi penulis untuk meraih pendidikan lebih tinggi dan menjadi pribadi yang lebih baik dari mereka;
5. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Berhenti Bercita-cita adalah tragedi terbesar dalam hidup manusia.”(Andrea Hirata*)



* Andrea Hirata. 2006. Sang Pemimpi. Yogyakarta: Bentang Pustaka. Hal. 148.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfia Khorida

NIM : 120910101084

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Keputusan Vietnam Bergabung dalam *The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR) China*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Mei 2017

Yang menyatakan,

Lutfia Khorida

NIM 120910101084

SKRIPSI

Keputusan Vietnam Bergabung Dalam *The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR) China*

Oleh

Lutfia Khorida
NIM 120910101084

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Honest Dody Molassy, S.Sos, MA

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Agung Purwanto, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Keputusan Vietnam Bergabung dalam *The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR) China*” telah diuji dan di sahkan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 08 Juni 2017
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : LKPK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember

Tim Penguji
Ketua

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

NIP. 196802291998031001

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A

NIP. 197611122003121002

Drs. Agung Purwanto, M.Si

NIP. 196810221993031002

Anggota I

Anggota II

Dr. Sunardi Purwaatmoko, MIS

NIP. 196010151989031002

Drs. Supriyadi, M.Si

NIP. 195803171985031003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Keputusan Vietnam Bergabung dalam The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR) China; Lutfia Khorida; 120910101084; 2017; 95 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pada tahun 2014 Vietnam dan China mengalami peningkatan ketegangan hubungan setelah terjadinya normalisasi hubungan di tahun 1991. Peningkatan ketegangan hubungan terjadi karena sikap China yang melakukan reklamasi pulau dan melakukan eksplorasi Sumber Daya Alam di wilayah yang masih menjadi sengketa antara China dan Vietnam. Akibat dari tindakan China tersebut, masyarakat Vietnam melakukan aksi pembakaran perusahaan – perusahaan yang berasal dari China sehingga memicu kemarahan China. Pada November 2015 Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan ke Vietnam dan menawarkan inisiatif kerjasama tersebut ditengah hubungan kedua negara yang belum kembali normal. Selanjutnya, pada kesempatan kunjungan dari presiden Xi ke Vietnam, pemerintah Vietnam yang diwakili oleh perdana menteri Nguyen Phu Throng menandatangani kesepakatan dokumen pembangunan rel kereta api yang menandai bergabungnya Vietnam ke dalam inisiatif SREB dan MSR.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Vietnam untuk memutuskan bergabung dalam inisiatif SREB dan MSR. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian *literatur research* yang bersifat deskriptif kualitatif dengan logika berpikir deduktif. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal, media cetak maupun online. Data-data tersebut dianalisis lalu kemudian dideskripsikan atau diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran secara utuh permasalahan yang diteliti ini.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keputusan Vietnam bergabung dalam inisiatif SREB dan MSR dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kebutuhan investasi asing langsung di Vietnam, Kondisi geografis Vietnam yang berdekatan dengan China, Inisiatif SREB dan MSR sejalan dengan inisiatif yang dibuat oleh Vietnam yakni *two corridors, one economic circle* Vietnam. Faktor Eksternal meliputi aksi dari

Pemerintah China yang Telah Mempromosikan dan Mengajak Negara-negara Lain Bergabung dalam Inisiatif. Beberapa negara di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika telah menyatakan bergabung dalam inisiatif, kerjasama *Greater Mekong Subregion* (GMS) yang Telah Dilakukan Sebelumnya dengan China. Keputusan yang diambil oleh pembuat keputusan di Vietnam adalah keputusan yang paling menguntungkan bagi kepentingan Vietnam.



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Keputusan Vietnam Bergabung dalam The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Maritime Silk Road (MSR) China*”. Skripsi disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

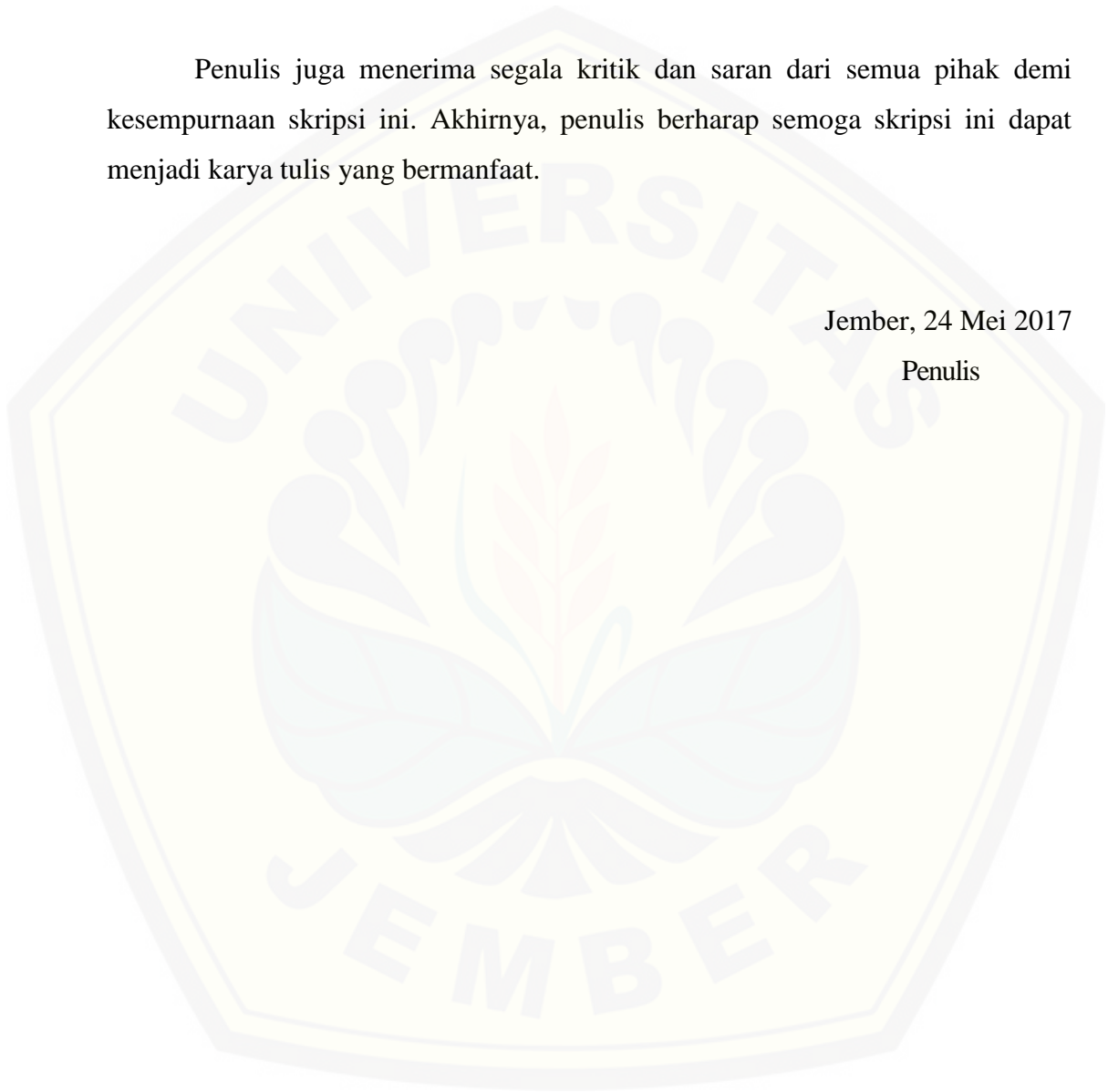
1. Bapak Dr. Ardiyanto, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M. Si, Ph. D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
3. Ibu Dra. Sri Yuniati, M. Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
4. Bapak Honest Dody Molassy, S.Sos, MA selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Drs.Agung Purwanto, M.Si selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam membantu penulis menyusun skripsi selama ini;
5. Bapak Drs. Agung Purwanto M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dengan segala ilmu dan pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama belajar di jurusan ini;
7. Pimpinan dan staf perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan baik doa maupun nasehat serta semangat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini;

9. Teman-teman jurusan Ilmu Hubungan Internasional 2012. Semoga tetap kompak selepas lulus nanti;
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi karya tulis yang bermanfaat.

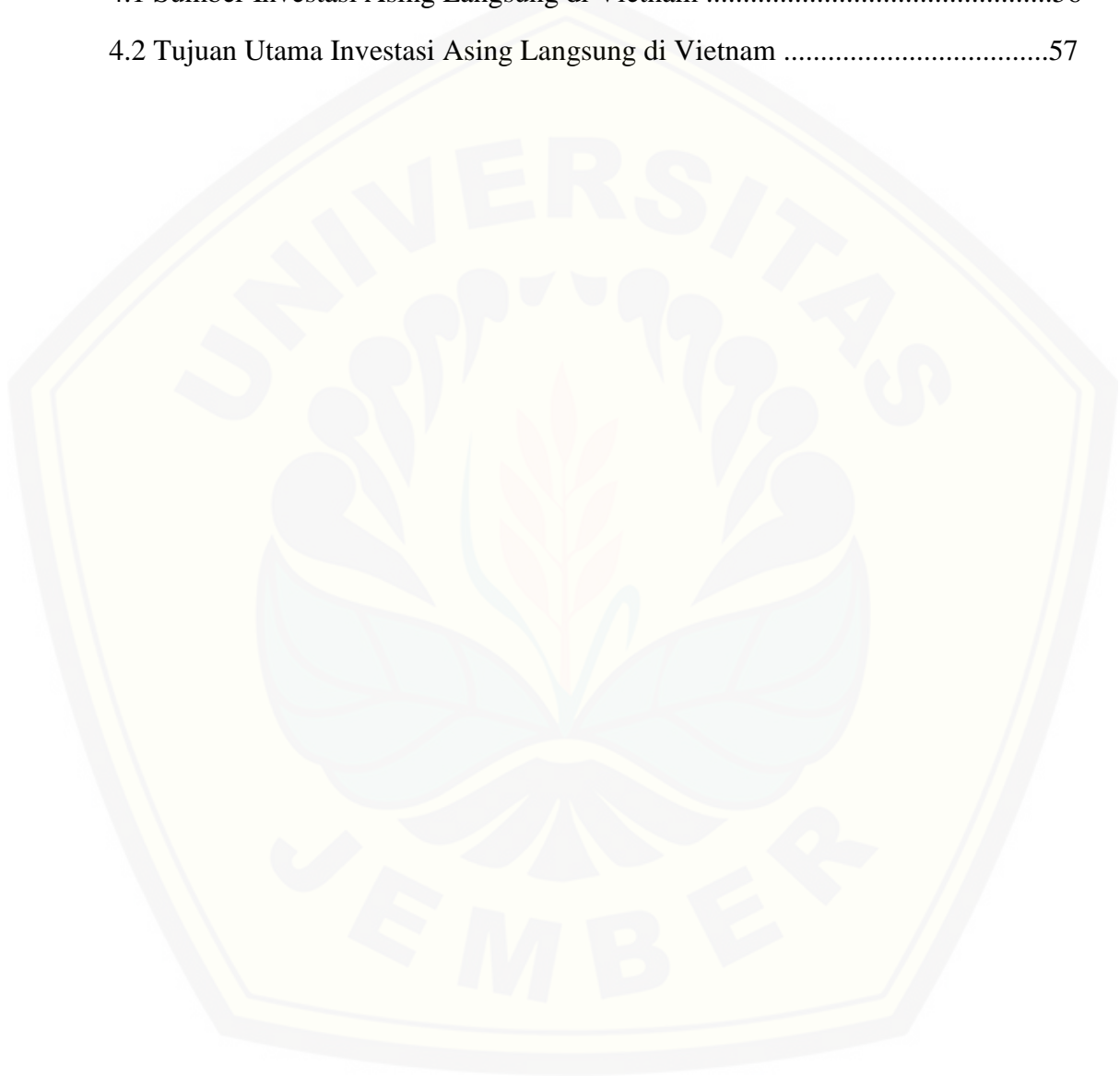
Jember, 24 Mei 2017

Penulis



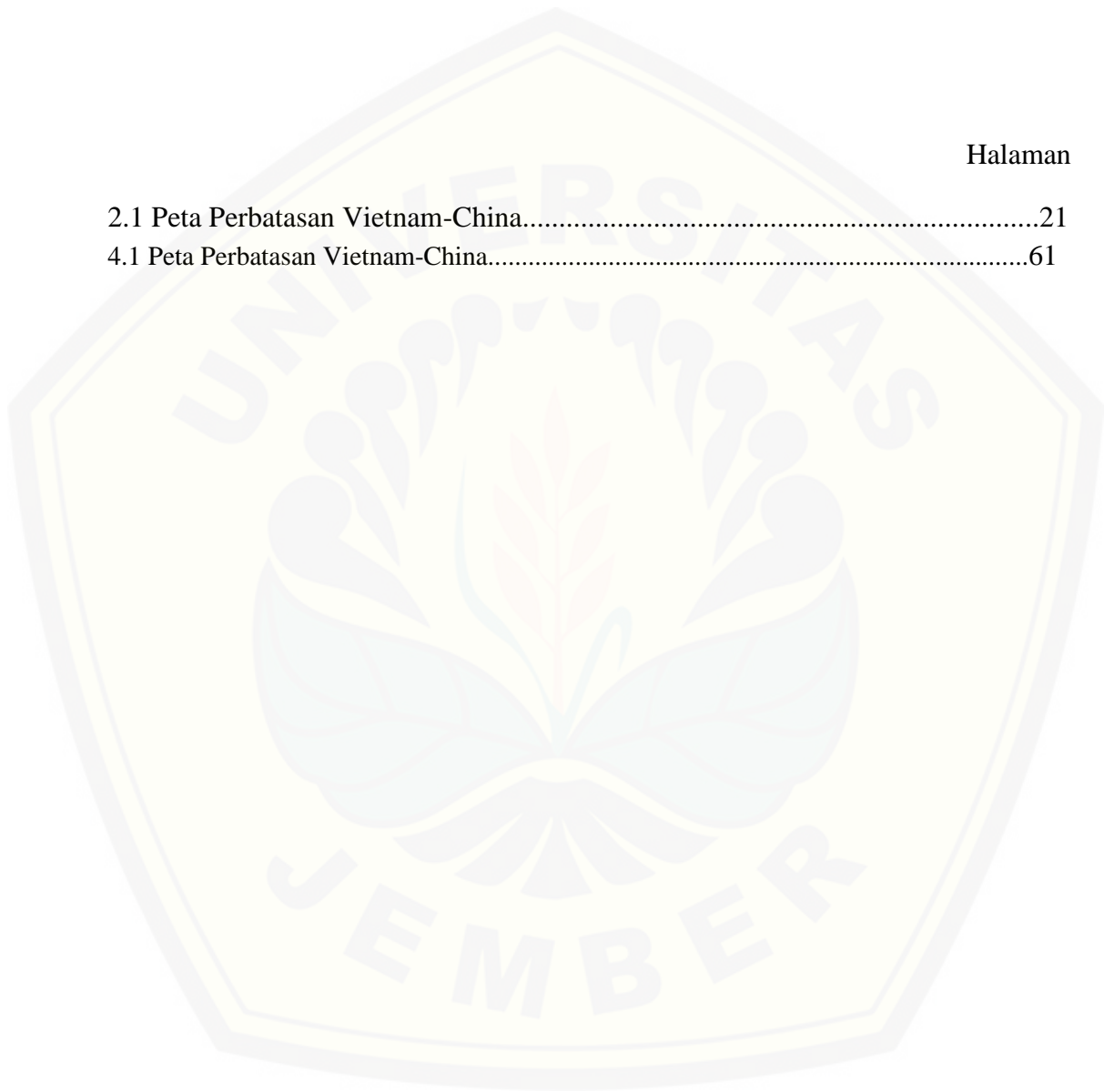
DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Nilai Ekspor dan Impor Vietnam-China Tahun 2011-2015.....	36
4.1 Sumber Investasi Asing Langsung di Vietnam	56
4.2 Tujuan Utama Investasi Asing Langsung di Vietnam	57



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Peta Perbatasan Vietnam-China.....	21
4.1 Peta Perbatasan Vietnam-China.....	61



DAFTAR SINGKATAN

ADB	: Bank Pembangunan Asia
AIDS	: Mengakuisisi Sindrom Kekurangan Daya Tahan Tubuh
AFTA	: Kawasan Perdagangan Bebas Asia
APEC	: Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik
ASEAN	: Persatuan Bangsa Asia Tenggara
CIA	: Badan Pusat Kecerdasan
CEP	: Inti Program Lingkungan
EIA	: Administrasi Informasi Energi
FDI	: Investasi Asing Langsung
GNP	: Produk Nasional Bruto
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MDG	: Tujuan Pembangunan Millenium
MoU	: Nota Kesepahaman
MSR	: Jalur Sutra Maritim
NGO	: Organisasi Non Pemerintah
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PKC	: Partai Komunis China
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SREB	: Jalur Sutra Sabuk Ekonomi
TBC	: Tubercullosis
WTO	: Organisasi Perdagangan Dunia
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.2.1 Batasan Materi	6
1.2.2 Batasan Waktu	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Landasan Dasar Pemikiran	7
1.6 Argumen Utama.....	13
1.7 Metode Penelitian	13
1.7.1 Jenis Penelitian.....	13
1.7.2 Teknik Pengumpulan Data	14
1.7.3 Teknik Analisis Data.....	14
1.8 Sistematika Penulisan	15
BAB 2. Gambaran Umum Negara Vietnam dan Hubungan dengan China	18
2.1 Gambaran Umum Geografi dan Dinamika Hubungan Vietnam-China....	19
2.1.1 Gambaran Umum Geografi.....	19
2.1.2 Sejarah Vietnam Sebelum Reunifikasi dan	

Hubungan dengan China.....	21
2.1.3 Hubungan Vietnam-China Terkait Laut China Selatan.....	24
2.2 Perekonomian Vietnam dan Kerjasama Regional Vietnam-China.....	27
2.2.1 Gambaran Ekonomi Vietnam.....	27
2.2.2 Program <i>Greater Mekong Subregion</i>	33
2.2.3 Nilai Ekspor dan Impor Vietnam-China.....	35
BAB 3. Kerjasama <i>The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB)</i>	
<i>and 21st Century Maritime Silk Road (MSR)</i> Antara Vietnam dan	
China.....	38
3.1 Kerjasama Vietnam-China dalam <i>The Initiative of The Silk Road</i>	
<i>Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR)</i>	
China	39
3.1.1 Prinsip Dasar dan Framework Dari <i>The Initiative of The Silk Road</i>	
<i>Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR)</i> ..	39
3.1.2 Prioritas Kerjasama <i>The Initiative of The Silk Road Economic Belt</i>	
<i>(SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR)</i>	42
3.2 Pandangan Vietnam terhadap <i>The Initiative of The Silk Road Economic</i>	
<i>Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR)</i> China.....	47
3.2.1 Pembangunan Two Corridors, One Economic Circle.....	48
3.2.2 Rencana Pembangunan Strategi Sosial Ekonomi Vietnam 2011-	
2020.....	51
BAB 4. Analisa Keputusan Vietnam Bergabung dalam <i>The Initiative of The</i>	
<i>Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR)</i>	
China	53
4.1 Faktor Internal	53
4.1.1 Kebutuhan Vietnam Terhadap Investasi Asing Langsung.....	54
4.1.2 Kondisi Geografis Vietnam yang Berbatasan Langsung dengan	
China	60

4.1.3 Inisiatif SREB dan MSR Sejalan dengan Inisiatif <i>Two Corridors</i> , <i>One Economic Circle Vietnam</i>	62
4.2 Faktor Eksternal.....	64
4.2.1 Aksi dari Pemerintah China yang Telah Mempromosikan dan Mengajak Negara Lain Bergabung dalam Inisiatif	64
4.2.1.1 Aksi dari Pemerintah China yang Telah Mempromosikan dan Memperkenalkan The initiative of The Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road di kawasan Eropa	65
4.2.1.2 Aksi dari Pemerintah China yang Telah Mempromosikan dan Memperkenalkan The initiative of The Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road di kawasan Asia.....	66
4.2.1.3 Aksi dari Pemerintah China yang Telah Mempromosikan dan Memperkenalkan The initiative of The Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road di kawasan Afrika.....	68
4.2.2 Kerjasama Subregional Greater Mekong Subregion (GMS).....	69
4.2.2.1 Program Kerjasama dalam GMS.....	70
4.2.2.2 Aktivitas GMS di Vietnam.....	74
4.2.2.3 Prioritas Kerjasama dalam GMS dan The Initiative of The Silk Road Economoc Belt and 21st Century Maritime Silk Road.....	78
4.3 Pilihan Keputusan Pemerintah China.....	84
BAB 5. KESIMPULAN	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Vietnam adalah salah satu negara kawasan Indochina. Negara Vietnam berada di benua Asia. Tepatnya berada di bagian selatan pesisir timur benua Asia. Negara Vietnam berada di 9 derajat Lintang Utara-23 derajat Lintang Utara dan diantara 103 derajat Bujur Timur -109 derajat Bujur Timur¹. Negara ini mempunyai jumlah penduduk 91,700,000 jiwa pada tahun 2015, terbesar ke-14 di dunia.²

Vietnam merupakan negara bekas jajahan Perancis yang menyatakan kemerdekaannya pada 02 September 1945 namun kembali dikuasai oleh Perancis saat Perancis ditugaskan untuk melucuti senjata oleh sekutu di kawasan Indocina. Saat itu, posisi Vietnam yang baru merdeka masih belum kuat sehingga Vietnam tidak mampu untuk menahan tekanan dari Perancis yang ingin menguasai kembali Vietnam sehingga Perancis berhasil menguasai Vietnam bagian utara.³ Pemimpin Vietnam pada saat itu Ho Chi Minh memilih jalan perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan namun tidak mencapai kesepakatan. Perang senjata melawan Perancis pun terjadi. Pada perang tersebut, Perancis menggunakan pasukan terlatih dengan persenjataan lengkap, termasuk kekuatan udara dan laut. Sementara itu, pasukan Vietnam yang dibantu rakyat dengan persenjataan terbatas mulai memperoleh bantuan dari China.⁴

Pada tahun 1954 di Jenewa, kedua pihak yang berperang sepakat untuk membagi Vietnam menjadi 2 bagian yaitu Komunis Vietnam Utara dan Kapitalis Vietnam Selatan setelah Perancis mengalami kekalahan besar pada pertempuran

¹Socialist Republic of Vietnam Government Portal. 2015. *Overview on Vietnam Geography*. [online] dalam <http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/TheSocialistRepublicOfVietnam/AboutVietnam/AboutVietnamDetail?categoryId=10000103&articleId=10000505>, [diakses pada 10 Mei 2016].

²Worldbank. 2015. *Vietnam*. [online] dalam <http://data.worldbank.org/country/vietnam>, [diakses pada 16 Mei 2016].

³Admin. Sejarah Singkat Vietnam. 2014. [online] dalam <http://www.bersosial.net/sejarah-singkat-vietnam.xhtml>, [diakses pada 16 Mei 2016].

⁴*Ibid.*

Dien Bien Phu melawan pasukan Vietnam.⁵ Pemerintahan komunis atas Vietnam Utara yang mirip dengan Uni Soviet dan China memicu perhatian dari Amerika Serikat yang saat itu gencar melakukan pembendungan terhadap perkembangan komunis. Hal tersebut membuat Amerika Serikat mengirim pasukan militernya ke Vietnam Utara. Pada perang melawan Amerika Serikat ini, Vietnam Utara berhasil mendapatkan kemenangan dengan jatuhnya ibu kota Vietnam Selatan, Saigon. Karena kekalahan tersebut, Vietnam Utara berhasil menguasai Vietnam Selatan dan terjadi reunifikasi. Pada tanggal 2 Juli 1976, Vietnam diproklamkan menjadi Republik Sosialis Vietnam hingga sekarang.⁶ Dalam menjalankan pemerintahannya, Vietnam menggunakan sistem satu partai yaitu partai komunis dan melarang adanya partai lain selain komunis. Paham komunis di Vietnam banyak dipengaruhi dari negara tetangganya yaitu China.

Kesamaan paham komunis antara Vietnam dan China tidak selamanya membuat hubungan kedua negara harmonis. Hal itu dibuktikan dengan adanya perselisihan perbatasan diantara kedua negara yaitu di Laut China Selatan. Laut China Selatan menjadi kawasan yang diperebutkan kedua negara setelah China mengakui secara sepihak klaim kedaulatan Laut China Selatan dengan mengeluarkan peta yang mengklaim kedaulatan tersebut pada tahun 1947.⁷

Vietnam dan China pernah terlibat kontak senjata dalam perselisihan klaim wilayah. Yaitu pada tahun 1979 di kepulauan Paraceel dan mengakibatkan ribuan tentara tewas.⁸ Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi organisasi untuk perdamaian dunia telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan melalui kesepakatan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang mengatur mengenai prinsip-prinsip hukum laut Internasional. Pada kenyataannya kesepakatan tersebut tidak menjadi solusi diantara negara yang bersengketa. Konflik itu berlanjut kembali pada tahun 1988 antara China dan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷BBC Indonesia. 2011. *Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan*. [online] dalam http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict [diakses pada 10 Mei 2016].

⁸ Evelyn Goh. 2005. *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*. Washington, D.C:East-West Center Washiongton.Hal 19.

Vietnam untuk memperebutkan kepulauan Spratly yang menyebabkan tentara Vietnam tewas. Perselisihan yang terjadi antara kedua negara termasuk yang paling tinggi intensitasnya di kawasan Laut China Selatan.⁹

Pada Tahun 1991 China-Vietnam mempunyai keinginan untuk memperbaiki dan menormalisasi hubungan kedua negara. Hubungan perdagangan diantara kedua negara pun ditingkatkan dan ketegangan mengenai sengketa Laut China Selatan bisa diredam namun ketegangan itu kembali terjadi setelah 20 tahun berlalu. Tepatnya pada tahun 2011. Peningkatan ketegangan itu terjadi karena Vietnam menuding kapal-kapal China telah memutuskan kabel yang dipasang tim survey gempa bumi dari kapal yang dioperasikan perusahaan minyak milik pemerintah Vietnam. Kejadian tersebut berlangsung di dalam zona ekonomi eksklusif Vietnam yang berjarak 200 mil laut dari pantai Vietnam sehingga Vietnam merasa China telah melakukan klaim wilayah secara sepihak dan memicu terjadinya konflik¹⁰. Menanggapi sikap dari kegiatan yang dilakukan pemerintah China tersebut, Vietnam telah mengadakan latihan militer dengan peluru tajam di lepas pantai. Latihan militer itu dianggap China sebagai langkah provokasi untuk melakukan perang. Hubungan kedua negara pun mengalami ketegangan saat itu.

Pada tanggal 13 Mei 2014 China kembali melakukan kegiatan yang memicu konflik. China menempatkan anjungan minyak lepas pantai milik perusahaan minyak yang bernama CNOOC. Anjungan minyak di tempatkan di lokasi yang berjarak 240 km dari pesisir Vietnam.¹¹ Vietnam melakukan protes atas kegiatan dari kapal penelitian China tersebut dengan menganggap kegiatan

⁹ *Ibid.*

¹⁰News Viva. 2011. *Laut China Selatan picu konflik China-Vietnam*. [online] dalam <http://m.news.viva.co.id/cangkang/ramadan2014/read/225832-china-vietnam-bersitegang-di-wilayah-sengketa>, [diakses pada 13 Maret 2016].

¹¹Cnn Indonesia. 2014. *Tiongkok Bertekad Perbaiki Hubungan dengan Vietnam* [online] dalam <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141226141709-106-20610/tiongkok-bertekad-perbaiki-hubungan-dengan-vietnam/>, [diakses pada 11 Maret 2016].

itu dilakukan di lepas pantai Vietnam sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak-hak yurisdiksinya.¹²

Kegiatan China tersebut memicu warga Vietnam untuk melakukan aksi membakar semua hal yang terkait dengan China seperti toko, perusahaan multinasional yang berasal dari China. Warga Vietnam juga melakukan demo untuk menyatakan bahwa mereka tidak suka atas tindakan China di Laut China Selatan yang menurut warga Vietnam tindakan China telah melanggar kedaulatan. Aksi tersebut menewaskan pekerja China dan Vietnam tewas sedangkan yang lainnya terluka. Protes juga dilakukan oleh warga Vietnam di China. Tepatnya di depan kementerian Luar Negeri China di Hongkong dengan membawa atribut bendera Vietnam serta menyanyikan lagu-lagu patriotisme.¹³ Aksi protes dan demo yang dilakukan warga Vietnam tersebut membuat China marah. Pada 18 Mei 2014, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei, China mengancam akan menanggukkan beberapa kerjasama bilateral dengan Vietnam.¹⁴ China juga telah memberikan peringatan pada warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Vietnam. Adanya konflik itu membuat hubungan diplomatik kedua negara di tahun 2014 mencapai titik terendah sejak normalisasi hubungan tahun 1991.

Hubungan yang memburuk di tahun 2014 menimbulkan akibat investasi asing langsung China di Vietnam mengalami penurunan. Hal itu terjadi karena perusahaan-perusahaan multinasional China di Vietnam dibakar oleh para demonstran sehingga investor China merasa tidak aman melakukan investasi di Vietnam. Para demonstran menuntut untuk pemerintah Vietnam mengambil sikap tegas terhadap sikap China di Laut China Selatan.

¹²VOA.2011. *Vietnam Protes Beijing Soal Eksplorasi di Laut China Selatan*. [online] dalam <http://www.voaindonesia.com/content/vietnam-protes-beijing-soal-eksplorasi-di-laut-cina-selatan--127294318/96518.html>, [diakses pada 24 Januari 2016].

¹³Leuserantara. 2014. *Vietnam Serukan Gerakan Anti China*. [online] dalam <http://leuserantara.com/vietnam-serukan-gerakan-anti-cina/#sthash.yYMJ7SZi.dpuf>, [Diakses pada 11 Maret 2016].

¹⁴Sindonews. 2014. *China Tangguhkan Kerjasama Bilateral dengan Vietnam*. [online] dalam <http://international.sindonews.com/read/864702/40/china-tangguhkan-kerjasama-bilateral-dengan-vietnam-1400405513>, [diakses pada 11 Maret 2016].

Pada bulan April 2015, sekretaris Jenderal partai komunis Nguyen Phu Trong melakukan kunjungan ke China untuk meminta kejelasan sikap dari pemerintah China terkait Laut China Selatan dan bertemu dengan presiden China Xi Jinping. Pada kunjungan tersebut, Vietnam mendapatkan tawaran untuk bergabung dalam inisiatif SREB dan MSR yang digagas oleh China di abad ke-21 ketika GDP China tertinggi selama 7 tahun terakhir di tahun 2013 dan tertinggi di Asia¹⁵. Inisiatif ini dikeluarkan pertama kali oleh presiden China Xi Jinping tahun 2013 di Kazakhtan dalam pidato kunjungan kenegaraan. Namun pada saat itu Vietnam belum mengambil keputusan atas tawaran dari China.

Salah satu kawasan yang penting bagi jalur maritime silk road China adalah Laut China Selatan. Seperti yang tertulis dalam draft dan publikasi *vision and actions on jointly Building silk road economic belt and 21st century maritime silk road*, yang dikeluarkan oleh pemerintah China pada Maret 2015 menyatakan bahwa “*The 21st-Century Maritime Silk Road is designed to go from China's coast to Europe through the South China Sea and the Indian Ocean in one route, and from China's coast through the South China Sea to the South Pacific in the other*”.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa China menganggap kawasan Laut China Selatan menjadi sangat penting untuk jalur maritim *silk Road* namun di satu sisi China masih bersengketa dengan negara-negara di Asia Tenggara yang juga mengklaim kedaulatan wilayah Laut China Selatan termasuk yang paling tinggi intensitasnya adalah dengan Vietnam.

Pada tanggal 5-7 November 2015 presiden China melakukan kunjungan ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Salah satunya adalah mengunjungi Vietnam untuk yang pertama kalinya semenjak 10 tahun terakhir. Kunjungan presiden Xi ke Vietnam Selain bertemu dengan Presiden dan perdana menteri Vietnam, juga bertemu dengan Sekretaris Jenderal partai Komunis Vietnam

¹⁵Trading Economy. 2014. *China GDP*. [online] dalam <http://www.tradingeconomics.com/china/gdp>. [diakses pada 22 April 2016].

¹⁶National Development and Reform Commission People's Republic of China. 2015. *Vision and Action on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road*. [online] dalam http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html. [diakses pada 11 Maret 2016].

Nguyen Phu Throng.¹⁷ Pada kunjungan tersebut, Presiden Xi kembali melakukan pembicaraan dengan petinggi politik di Vietnam untuk bergabung dalam inisiatif yang diprakarsai oleh China. Pada tanggal 6 November 2015 Vietnam memutuskan bergabung dalam inisiatif SREB dan MSR China. Kedua negara juga melakukan perjanjian studi kelayakan pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Hanoi-Lao Chai dan pelabuhan Hai Phong.¹⁸

Fenomena ini menarik bagi kajian ilmu Hubungan Internasional karena terkait dengan interaksi yang dinamis di antara aktor utama dalam hubungan Internasional yaitu negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa hubungan kedua negara yang bertetangga ini dari sisi Vietnam. Mengapa vietnam memutuskan bergabung dalam inisiatif SREB dan MSR melalui karya ilmiah yang berjudul : **Keputusan Vietnam Bergabung dalam The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR) China.**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam sebuah penelitian, batasan ruang lingkup pembahasan menjadi hal yang penting karena akan menjadi acuan dari peneliti dalam mengamati fenomena yang akan dianalisis dengan teori yang sesuai sehingga akan mengantarkan penelitian menjadi tulisan yang sistematis.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian karena akan membuat penulis lebih terarah dan terfokus pada inti dari materi yang akan dibahas dan dianalisis. Batasan materi dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai alasan dari keputusan Vietnam bergabung dalam inisiatif SREB dan MSR China. Yaitu sejak pemerintah China mengeluarkan inisiatif, sebelum

¹⁷Xinhuanet. 2015. *Interview: Xi's visit marks milestone in Vietnam-China ties -- Vietnamese senior party official*. [online] dalam http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/05/c_134784809.htm, [diakses pada 13 Maret 2016].

¹⁸ Xinhuanet. 2015. *China, Vietnam agree on feasibility study of railway project*. [online] dalam http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/06/c_134791099.htm. [diakses pada 14 Januari 2016].

bergabung ke dalam inisiatif hingga pemerintah Vietnam menanggapi dan merespon ajakan dari pemerintah China untuk bergabung.

1.2.2 Batasan Waktu

Selain batasan materi, batasan waktu juga menjadi hal yang penting dalam sebuah penelitian. Batasan waktu akan membantu peneliti dalam menentukan rentang waktu yang akan diteliti dan dianalisis. Dalam penulisan skripsi ini, batasan waktu yang digunakan dimulai dari Maret 2013 saat pertama kalinya presiden Xi mengumumkan inisiatif *SREB dan MSR* hingga tahun 2015 yakni setelah Vietnam memutuskan bergabung dalam inisiatif SREB dan MSR.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dibahas dan dianalisis adalah Mengapa Vietnam memutuskan bergabung dalam *The Initiative of the silk road economic belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR)* China?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian akan selalu ada dalam sebuah penelitian baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Tentu saja berangkat dari masalah yang telah dirumuskan oleh penulis. Tujuan penelitian kualitatif menurut Creswell istilah tujuan penelitian adalah *purpose statement*. *A purpose statement is a statement that advance the overall direction of focus for the study.*¹⁹ Jadi sebuah pernyataan tujuan adalah pernyataan yang menyatakan keseluruhan arah fokus untuk penelitian.

Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan atau sebab yang membuat *decision maker* di Vietnam memutuskan untuk bergabung dalam inisiatif SREB dan MSR.

1.4 Landasan Pemikiran

Dalam penulisan karya tulis ilmiah diperlukan kerangka pemikiran untuk membantu penulis dalam menganalisa permasalahan sehingga dapat memberikan jawaban dengan tepat. Kerangka dasar pemikiran berisi konsep atau teori yang

¹⁹Creswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach, Second Edition*. London and New Delhi: SAGE Publication. Halaman 15.

dipilih dan disusun secara sistematis. Pembahasan atau penulisan yang hendak penulis uraikan adalah mengenai masalah mengapa Vietnam memutuskan bergabung dalam *The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR)* China.

Untuk menjelaskan dan menganalisa permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka diperlukan kerangka dasar pemikiran yang digunakan untuk menyusun hipotesa selanjutnya dalam bentuk konsep. Kerangka teori atau konsep dapat membantu penulis menjelaskan dan meramalkan fenomena politik sehingga membantu dalam menjawab permasalahan yang terjadi. Dalam membahas masalah ini, penulis menggunakan teori yang relevan untuk mengurai dan menganalisis fenomena permasalahan yang diuraikan sebelumnya yaitu menggunakan *decision making theory* . Pengertian *Decision Making Theory* menurut Jack C. Plano adalah

“Decision Making Theory merupakan studi tentang sistem politik melalui analisa proses pengambilan keputusan. Proses tersebut terletak pada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para aktor politik, bagaimana persepsinya, terhadap suatu permasalahan, penyusunan fakta-fakta, pertimbangan alternatif dan pemilihan cara bertindak²⁰.

Teori tersebut menggunakan sudut pandang pembuat keputusan yakni menempatkan suatu keputusan politik atau serangkaian keputusan sebagai sasaran analisa. Tujuan utama penelaahan proses pembuatan keputusan mempengaruhi isi keputusan yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa proses pembuatan keputusan yang berbeda, situasi, individu dan organisasi yang berbeda akan menghasilkan kebijakan yang berbeda pula²¹. Pembuat keputusan secara sederhana merupakan tindakan memilih diantara berbagai alternatif yang ada yang diliputi berbagai ketidakpastian²². Dengan demikian, pembuatan keputusan merupakan politik dalam makna yang paling mendasar. Disitu proses keputusan menghadapi

²⁰ Jack C. Plano. 1982. Kamus Analisa Politik. Jakarta:CV Rajawali. Hal. 57.

²¹ Robinson, James dan Richard C. Snyder, dalam Mochtar Mas' oed.1989. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*, Yogyakarta: PAU-UGM. Hal.116.

²² Dourgherty, E. James dan Robert L. Pfatzgraff Jr dalam A. Eby Hara. 1991. *Decision Making Theory dalam Studi HI: Suatu Upaya Teorisasi*, dalam jurnal Ilmu Politik No.9.PT. Jakarta: Gramedia.Hal.17.

berbagai tantangan dari luar dan dalam. Decision making theory meliputi upaya rekonsiliasi tujuan yang saling berlawanan, upaya menyesuaikan aspirasi dengan sarana yang tersedia, dan mengakomodasikan berbagai tujuan dan aspirasi berbeda satu dengan yang lainnya²³.

Dalam mengambil suatu keputusan, negara tidak akan lepas dari proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dapat dianalisa dengan *decision making process*. Bruck, Sapin, dan Snyder memberikan arahan tentang keputusan suatu negara. Bahwa negara harus mengambil sikap dari tindakan pemerintah negara lain. Sikap dari suatu negara tersebut merupakan politik internasional. Politik Internasional akan melihat dan mempelajari terhadap apa yang terjadi diantara entitas politik dalam suatu negara bangsa dalam menanggapi tindakan dari pemerintah negara lain.²⁴ Sikap tersebut berupa keputusan yang dibuat oleh negara. Politik internasional diamati dan dikaji dalam ilmu Hubungan Internasional.

Teori pembuatan keputusan dari Snyder berangkat dari upaya menganalisis politik luar negeri suatu negara dengan membongkar alasan atau penyebab diambilnya keputusan oleh para pembuat keputusan atau individu dalam kelompok-kelompok eksekutif kunci atau disebut juga dalam unit-unit yang memutuskan (*desicional units*). Seorang pembuat keputusan juga disebut sebagai seorang aktor kelompok (*group actor*) yang sangat berpengaruh sehingga menjadi sangat penting dalam memahami unit dan *setting* yang berpengaruh dalam keputusan²⁵. Negara adalah aktor dalam situasi. Seperti yang dipaparkan oleh Snyder bahwa "*state action in the action taken by those acting in the name of the state*".²⁶ Dalam pembuatan keputusan Snyder yang dikenal adalah *decision meking process* dimana pendekatan internal dan eksternal menjadi acuannya. Pendekatan

²³Roger Hilsman, dalam A. Eby Hara. 1991. *Decision Making Theory dalam studi HI: Suatu Upaya Teorisasi*, dalam Jurnal Ilmu Politik No.9 Jakarta: PT.Gramedia.Hal.17.

²⁴ Richard C. Snyder, H.W. Bruck, Burton Sapin. 1969. *The Decision Making Approach to the Study of International Politics* dalam James N. Rosenou. *International Politics and Foreign Policy*. New York: The Free Press. Hal. 202.

²⁵Abubakar Eby Hara. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung:Penerbit Nuansa. Hal 85.

²⁶ *Lock Cit*.

internal setting dari Snyder dapat berupa *non human environment, society, humans, environment, culture, population*. Pendekatan eksternal dapat berupa *non human environment, other cultures, other societies, government action*.

Snyder dkk menekankan pentingnya definisi situasi yang dibuat oleh para pembuat keputusan. Pendefinisian situasi ini terdiri atas kegiatan-kegiatan dan hubungan-hubungan dari anggota-anggota unit yang dilihat berfungsi dalam *setting* baik internal maupun eksternal. Definisi situasi yang dibuat atau yang dianggap relevan oleh para pembuat keputusan yang berpengaruh pada negara X, dibentuk atau dibangun berkisar pada tindakan-tindakan yang diproyeksikan dan alasan-alasan bagi diambilnya tindakan oleh negara X dan juga negara-negara lain. Snyder, Bruck, Sapin mengatakan bahwa

Karenanya, adalah penting untuk menganalisis aktor-aktor dalam hal-hal berikut: (a) pemilahan dan penghubungan obyek-obyek, kondisi dan aktor-aktor lain, berbagai hal dipersepsikan atau diharapkan dalam suatu konteks relational; (b) keberadaan, pembuatan, atau definisi dari tujuan yang diinginkan dari situasi; (c) pengaitan signifikansinya terhadap berbagai tindakan yang dihubungkan dengan situasi mengikuti beberapa kriteria pengiraan; dan (d) penerapan *standarts of acceptability* yang (1) mempersempit pilihan persepsi, (2) mempersempit pilihan obyek-obyek yang diinginkan, dan (3) mempersempit jumlah alternatif²⁷.

Dalam decision making process Snyder, Snyder mendiskusikan (1) faktor-faktor subjektif dari perspektif para pembuat keputusan bagaimana mereka menggambarkan situasi bukan dari sudut pandang penulis dan (2) sumber-sumber potensial dari tindakan negara dalam lingkungan para pembuat keputusan²⁸. Dengan menganalisis faktor yang berada di pihak para pembuat keputusan dan memberi bentuk serta isi pada pemilihan mereka, Richard C. Snyder membagi faktor tersebut menjadi tiga kelompok dorongan utama yaitu diantaranya keadaan intern, ekstern, *social structure and behaviour*²⁹:

²⁷Snyder dalam Abubakar Eby Hara. *op.cit*, hal 85-86.

²⁸Paul R. Votti, Mark V. Kauppi. 1990. *International Relation Theory: Realism,Pluralism,Globalism*. New York: Macmillan Publishing Company. Hal. 198.

²⁹ *Ibid*.

Keadaan Intern : yaitu masyarakat. Kepada siapa para pejabat membuat keputusan yang meliputi Domestic Politics (politik domestik) yang dimana politik luar negeri suatu negara itu berimplikasi pada politik domestik. Selanjutnya Non Human Environment dalam hal ini yang dimaksud adalah lingkungan yang mempengaruhi pembuat keputusan dari pemerintah suatu negara. yang terakhir adalah aksi suatu negara untuk memberikan faktor yang baik didalam maupun diluar, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa aksi dapat menjadi stimulan dalam aksi yang kemudian menimbulkan reaksi dan tentu saja mempengaruhi atau merubah *behaviour* atau tingkah laku suatu negara.

Keadaan ekstern: Yang terdiri dari aksi dan reaksi dari negara lain (yang berarti para pembuat keputusan di negara-negara tersebut) dan masyarakat untuk siapa mereka bertindak, siapapun dan apapun yang membantu dan menghambat dalam mencapai tujuan tergantung kepada *decision making process* atau persepsi pembuat keputusan. proses pembuatan keputusan yang timbul didalam organisasi pemerintah dan di tempat-tempat proses tersebut merupakan suatu bagian. Snyder memandang hal ini terdiri dari tiga sub bab kategori pokok : (1) bidang kemampuan, (2) komunikasi dan informasi (3) motivasi.

Richard C. Snyder memulai penjelasannya dengan menganalisa faktor-faktor yang relevan. Pertama, semua tindakan politik dilakukan oleh manusia yang konkret. Kedua, apabila seorang peneliti ingin memahami dari dinamika-dinamika tindakan ini, peneliti harus siap untuk memandang dunia dari perspektif pembuat keputusan.³⁰ Snyder berpendapat bahwa dalam usaha memahami tindakan negara dengan tepat, sangat penting bagi kita untuk mengetahui siapa yang membuat keputusan penting yang menyebabkan timbulnya suatu tindakan tertentu dan menilai proses-proses intelektual dan interaktif yang ditempuh para pembuat keputusan³¹. Pada proses intelektual tersebut, manusia adalah model yang digunakan untuk memecah masalah yang rasional kemudian mengeksplorasi proses-proses terkait dengan penyusunan kebijakan luar negeri. Berdasarkan asumsi bahwa setiap pengambilan keputusan politik luar negeri merupakan

³⁰ S.P. Varma. 1990. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali. hal 39.

³¹ *Ibid.* hal 391-392.

pemecah masalah yang rasional. Ada beberapa tahapan dalam membuat keputusan sebagai tugas intelektual yakni menetapkan situasi, memilih tujuan, pencarian alternatif, memilih alternatif dan selanjutnya adalah keputusan³².

Pada tahap awal proses pengambilan keputusan, seorang pembuat keputusan yang memecahkan masalah secara rasional harus terlebih dulu mendefinisikan situasi dengan mencari informasi sebanyak mungkin mengenai situasi internasional yang terjadi, serta pengaruhnya bagi negaranya setelah mendapatkan informasi yang diperlukan tersebut, maka pengambil keputusan memilih tujuan yang ingin dicapai. Tahapan selanjutnya adalah pencarian alternatif yaitu proses penjajakan yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan tersebut setelah pembuat keputusan memecahkan masalah yang rasional tadi cukup menjajaki seluruh alternatif yang mungkin, maka tahap selanjutnya adalah mempersempit alternatif dengan memilih alternatif. Tahapan memilih alternatif yang selanjutnya merupakan sebuah keputusan yang dipilih berdasarkan satu alternatif yang paling memuaskan³³.

Pada rumusan masalah karya ilmiah ini, penulis menggunakan tahapan pengambil keputusan sebagai tugas intelektual yang dilakukan oleh pengambil keputusan secara rasional. Pengambil keputusan yang dibahas dalam karya ilmiah ini adalah seorang yang berpengaruh besar pada setiap keputusan yang diambil yakni sekretaris jenderal partai komunis Vietnam, Nguyen Phu Throng. Pengambil keputusan memperhatikan situasi terhadap inisiatif *The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR)* yang ditawarkan oleh China kemudian memilih tujuan yang ingin dicapai dari inisiatif yang ditawarkan oleh pihak pemerintah China.

Pada masalah ini, setelah melihat situasi yang ada dan menetapkan tujuan, pengambil keputusan Vietnam mempunyai pilihan untuk bergabung atau tidak ke dalam inisiatif dan hasilnya adalah memutuskan untuk ikut bergabung secara penuh dari alternatif yang mungkin muncul dengan menandatangani perjanjian

³²William D. Coplin.1992. *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: CV.Sinar Baru Bandung.hal. 38.

³³*Ibid*.hal. 38-39.

konektivitas infrastruktur yang dirancang oleh China sebagai bagian dari tujuan inisiatif SREB dan MSR. Tujuan inisiatif SREB dan MSR yakni meningkatkan konektivitas untuk kemakmuran bersama. Keputusan tersebut merupakan hasil aksi dalam menanggapi tawaran China. Tindakan mempersepsi dan membalas aksi disebut interaksi. Interaksi ini merupakan sebuah penamaan bekerjanya antara aksi dan reaksi. Aksi datang dari china yang menawarkan inisiatif SREB dan MSR.

Pemilihan alternatif yang diambil oleh pengambil keputusan Vietnam adalah pilihan alternatif yang paling bermanfaat (*maximum gain*) untuk selanjutnya dijadikan keputusan dalam menanggapi aksi dari pemerintah lain. Richard Snyder mengasumsikan semua keputusan adalah rasional dengan mempertimbangkan *cost and benefit, pain and gain, dan utility and probability* untuk memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai. Snyder mendefinisikan decision making sebagai sebuah proses yang menyangkut pemilihan sejumlah masalah yang terbatas yang ditetapkan secara sosial, pemilihan alternatif sasaran yang ingin diterapkan dalam urusan negara yang dipikirkan oleh pembuat keputusan untuk kelangsungan kehidupan bangsa itu di masa mendatang.³⁴

Seperti yang telah dipaparkan pada kerangka dasar pemikiran diatas, Dalam pembahasan mengenai keputusan Vietnam bergabung dalam inisiatif *The silk road economic belt and 21st century maritime silk road* China, pengambilan keputusan diawali dari adanya tindakan pemerintah negara lain yang harus di tanggapi oleh negara yang harus dibahas dalam sistem politiknya untuk memilih dan memutuskan tindakan yang diambil. Untuk memutuskan tindakan tersebut, melibatkan *decision maker* atau pengambil keputusan siapa saja yang dilibatkan. Pengambil keputusan akan melakukan proses intelektual terhadap tindakan dari pemerintah lain untuk memahami dan menentukan sikap yang harus diambil untuk direspon atau tidak direspon. Dari proses intelektual tersebut akan memunculkan alternatif-alternatif. Dari pilihan-pilihan alternatif tersebut akan dipersempit. Pengambil keputusan akan memilih yang lebih menguntungkan dan memungkinkan bagi negaranya sehingga keputusan tersebut diambil sebagai

³⁴ *Ibid.* hal.191.

tanggapan dari tindakan pemerintah lain tentunya, berdasarkan bahwa pengambil keputusan politik luar negeri merupakan pemecah masalah yang rasional.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama menjadi penting dirumuskan untuk menjawab sementara dari rumusan masalah yang sudah ditentukan dalam karya tulis ilmiah. Pada karya tulis ilmiah ini, argumen utama yang diperoleh dari permasalahan yang diuraikan sebelumnya adalah pembuat keputusan di Vietnam mempersepsikan dua faktor. Persepsi ini berpengaruh pada keputusan bergabung dalam inisiatif SREB dan MSR diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Keputusan Vietnam bergabung dalam inisiatif SREB dan MSR didasarkan pada adanya kebutuhan investasi terhadap investasi asing langsung di Vietnam, kondisi geografis Vietnam yang berbatasan langsung dengan China, dan inisiatif SREB dan MSR sejalan dengan inisiatif *two corridors, one economic circle* yang digagas oleh Vietnam. Tiga faktor ini masuk dalam faktor internal. Faktor eksternal meliputi aksi dari Pemerintah China yang Telah Mempromosikan dan Mengajak Negara-negara Lain Bergabung dalam Inisiatif dan kerjasama *Greater Mekong Subregion* (GMS) yang Telah Dilakukan Sebelumnya dengan China.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu serta membantu penulis dalam menganalisa dan menjawab permasalahan³⁵. Dalam proses penelitian, perlu ditetapkan langkah-langkah yang sistematis untuk mendapatkan data, bagaimana data-data yang ada tersebut diolah sehingga bisa menghasilkan sebuah penelitian yang menjawab permasalahan yang diteliti.

1.7.1 Jenis Penelitian

Pada metodologi penelitian, terdapat dua jenis metode yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang

³⁵Prof.Dr.Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.Bandung:Penerbit Alfabeta. hal 2.

alamiah (natural setting). Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.³⁶

1.7.2 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang diperlukan.³⁷ Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode studi literatur. Dalam metode ini, tidak mengharuskan peneliti untuk melakukan observasi lapang untuk mendapatkan data. Data akan diperoleh dari informasi-informasi yang sudah ada dan penelitian sebelumnya yang dianggap relevan terhadap fenomena yang akan dibahas dan dianalisa. jika dilihat dari sumber datanya adalah sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Data diperoleh dari dokumen dan sumber berita yang didapatkan oleh peneliti. Beberapa tempat dan sumber data yang digunakan dalam menganalisa fenomena dalam penulisan skripsi ini berasal dari:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Ruang Baca FISIP Universitas Jember
3. Situs-situs resmi pemerintahan, situs berita nasional maupun internasional
4. Buku
5. Artikel, jurnal ilmiah nasional dan internasional

1.7.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik penulisan ini berusaha menggambarkan dan mengkualifikasikan data-data ilmiah yang berupa gambar, kata-kata, angka yang

³⁶ *Ibid.* hal 7.

³⁷ *Ibid.* hal 224.

saling berkaitan kemudian, data-data tersebut dianalisis untuk mengetahui mengapa Vietnam memutuskan untuk bergabung dalam inisiatif the silk road economic belt and 21st century maritime silk road China.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai poin-poin penting atau garis besar dalam penelitian karya tulis. Poin-poin yang akan dijelaskan tersebut berisi pendahuluan yang menjabarkan latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Umum Vietnam dan Dinamika Hubungan Vietnam-China

Pada bab II penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum Vietnam sebagai negara yang meliputi geografi, keadaan ekonomi, kerjasama regional China-Vietnam yang telah terjalin. Selain itu juga dibahas mengenai dinamika hubungan Vietnam-China dari masa perang dingin hingga sekarang.

BAB III. Kerjasama The silk road economic belt (SREB) and 21st century maritime silk road (MSR) Antara Vietnam dan China

Pada bab III penulis akan membahas mengenai *The silk road economic belt and 21st century maritime silk road* China secara lebih mendalam sebagai inisiatif yang dikeluarkan oleh pemerintah China dan bagaimana pandangan Vietnam terhadap inisiatif tersebut.

BAB IV. Analisis keputusan Vietnam bergabung dalam *The initiative of the silk road economic belt and 21st century maritime silk road Cina*.

Pada bab IV ini penulis akan menganalisis dan menjawab dari rumusan masalah yakni mengapa pemerintah Vietnam memutuskan bergabung dalam *the initiative of the silk road economic belt and 21st century maritime silk road* China. Keuntungan atau manfaat apa yang diperoleh Vietnam dari bergabungnya dalam inisiatif SREB dan MSR.

BAB V. Kesimpulan

Pada bab V sebagai akhir dari penulisan karya tulis ini, berisikan kesimpulan terkait keputusan pemerintah Vietnam bergabung dalam “*The Initiative of The Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road*” China.



BAB 2. GAMBARAN UMUM VIETNAM DAN DINAMIKA HUBUNGAN VIETNAM - CHINA

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa hubungan Vietnam-China di masa lampau pernah terlibat dalam perang Vietnam dan perselisihan mengenai Laut China Selatan. Perselisihan klaim wilayah Laut China Selatan mengalami peningkatan ketegangan di tahun 2014. Peningkatan ketegangan terjadi akibat tindakan China yang melakukan pengeboran minyak dan reklamasi pulau buatan di wilayah yang dianggap Vietnam sebagai wilayah kedaulatannya. Tindakan China tersebut membuat warga Vietnam melakukan protes besar-besaran dengan membakar perusahaan China dan melukai warga China yang berada di Vietnam sehingga berhasil membuat pemerintah China berniat untuk memutuskan hubungan bilateral namun, pemerintah Vietnam tidak ingin hal tersebut terjadi. Pada November 2015 Vietnam memutuskan bergabung dalam inisiatif SREB dan MSR.

Skripsi ini akan mendiskusikan tentang keputusan Vietnam bergabung dalam *The Initiative of the Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR)*. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu didiskusikan terlebih dahulu tentang dinamika hubungan antara Vietnam – China. Diskusi ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai sejarah hubungan Vietnam – China di masa lampau dan gambaran umum Vietnam. Penjelasan pada bab ini dimulai dengan pembahasan tentang gambaran umum geografi. Pada bab ini pula akan dijelaskan mengenai perekonomian Vietnam dan kerjasama regional yang dilakukan oleh Vietnam dan China. Transaksi perdagangan juga dilakukan oleh kedua negara dibuktikan dengan kegiatan ekspor-impor kedua negara yang meningkat setiap tahunnya dan kerjasama regional yang telah disepakati.

Vietnam dan China adalah negara yang bertetangga dan terdapat beberapa hal yang menghubungkan keduanya terutama penampakan geografi yakni yang dihubungkan dengan sungai dan pegunungan hingga laut. Bahkan, kedua negara terlibat perselisihan wilayah yang menjadi klaim masing-masing negara yakni di Laut China Selatan. Vietnam – China di masa lampau juga terlibat dalam sejarah perang Vietnam dan mengalami pasang surut hubungan. Meski begitu, China –

Vietnam masih berusaha untuk tetap menjalin hubungan baik dengan menjalin kerjasama di kawasan regional dan tidak terlibat perang besar ditengah perselisihan yang masih terjadi sampai saat ini.

2.1 Gambaran Umum Geografi dan Dinamika Hubungan Vietnam - China

Geografi merupakan studi yang berkenaan dengan penampakan bumi, orang, tempat dan lingkungan serta tempat dimana kita hidup dan tinggal. Geografi juga menyangkut interaksi manusia dengan lingkungannya³⁸. Setiap negara tentunya memiliki keadaan geografi yang berbeda-beda. Keadaan geografi suatu negara akan menentukan negara tersebut berhubungan dengan negara lain yang letaknya berdekatan sebagai tetangga. Selanjutnya, dari hubungan sebagai negara tetangga akan memunculkan kerjasama-kerjasama yang saling memberikan manfaat satu sama lain. Manfaat yang didapat antara lain seperti memenuhi kebutuhan pasar internasional yang akan memberikan pengaruh pada keadaan ekonomi suatu negara.

2.1.1 Gambaran Umum Geografi

Negara Vietnam merupakan salah satu negara Indochina. Terletak di benua Asia tepatnya berada di bagian selatan pesisir timur benua Asia dengan letak astronomis 9 derajat Lintang Utara-23 derajat Lintang Utara dan diantara 103 derajat Bujur Timur -109 derajat Bujur Timur. Secara geografis, Vietnam berbatasan dengan China di sebelah utara, Laos dan Kamboja di sebelah barat, Laut China Selatan dan Filipina di sebelah Timur, Delta sungai Mekong di sebelah selatan. Secara topologi, Vietnam mempunyai beragam topologi yang terdiri dari bukit-bukit, pegunungan, delta, pantai. Di Vietnam, terdapat pegunungan tertinggi di Indochina yaitu puncak Fansipan dengan ketinggian 3143 meter. Selain pegunungan, juga terdapat delta. Ada dua delta utama dengan tanah yang subur yaitu Red River Delta yang dikenal sebagai delta utara dengan total luas 16.700 km² dan di sebelah selatan terdapat delta sungai Mekong dengan total

³⁸Sumaatmadja dalam Siti Nuraisyah Dewi. 2009. *Perkembangan Konsepsi Wilayah Pinggiran Kota dan Penerapannya di Departemen Geografi Universitas Indonesia*. Jakarta:FMIPA Universitas Indonesia.

luas 40.000 km². Diantara dua delta utama ini terdapat delta kecil dan sempit dari cekungan Sungai Ma di Thanh Hoa ke Phan Thiet dengan total luas 15.000 km².³⁹.

Negara ini memiliki garis pantai yang panjang yaitu 3260 km dari Mong Cai di Utara dan Ha Tien di barat daya. Wilayah perairan Vietnam di Laut Timur meluas ke Timur dan Tenggara, termasuk landas kontinen, pulau-pulau dan kepulauan. Ada sekelompok sekitar 3.000 pulau milik Viet Nam di Teluk Tonkin, termasuk Ha Long Bay, Bai Tu Long Bay, Cat Hai, Cat Ba dan Bach Panjang Vi *Island*. Lebih jauh di Laut Timur terdapat Sa Nusantara (Paracel Islands) dan Truong Sa Nusantara (Kepulauan Spratly) yang masih menjadi sengketa klaim dengan China. Di wilayah Barat dan Barat Daya, ada kelompok pulau termasuk Con Son, Phu Quoc dan Tho Chu⁴⁰.

Salah satu negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Vietnam di sebelah utara adalah China. Propinsi-propinsi di Vietnam berbatasan langsung dengan wilayah daratan China sehingga untuk bisa menjangkau wilayah China bisa dilalui dengan jalur darat untuk menuju ke Nanning , Guangzhou yang merupakan daratan China selain itu dapat juga melalui laut. Melalui jalur laut terdapat pelabuhan Ha Long Bay di Hai Phong. Ha Long Bay adalah tempat yang bisa diseberangi untuk menuju ke Hainan,China. Haiphong adalah wilayah yang strategis karena letaknya yang berdekatan dengan ibu kota vietnam yakni Hanoi. Penampakan geografi dan wilayah perbatasan Vietnam-China dapat dilihat pada peta dibawah ini

³⁹Embassy of The Socialist Republic of Vietnam in The United States of America. *Geography*. [online] dalam <http://vietnambassy-usa.org/vietnam/geography>, [diakses pada 20 Juli 2016].

⁴⁰ *Ibid*.

Gambar 2.1 Peta Perbatasan Vietnam-China



Sumber : *Maps of World*

2.1.2 Sejarah Vietnam Sebelum Reunifikasi dan Hubungan dengan China

Ho Chi Minh adalah orang yang berperan dalam upaya pembebasan Vietnam dari penjajahan ketika Indochina dikuasai oleh Perancis. Ho Chi Minh mendapatkan pengetahuan dan inspirasi dari revolusi Bolshevik di Rusia. Ho Chi Minh pernah bergabung dengan partai komunis dan pergi ke Uni Soviet untuk memperdalam pengetahuan tentang ajaran leninisme. Latar belakang pengetahuan yang didapat dari Uni Soviet digunakan rujukan oleh Ho Chi Minh untuk mendirikan partai komunis Indochina di tahun 1930 dan melawan pemberontakan Perancis di Indochina⁴¹. Pada perang Indochina, Vietnam terbagi menjadi Vietnam utara dan Vietnam selatan. China sebagai negara komunis, mempunyai kepentingan dan terlibat dalam upaya reunifikasi Vietnam.

⁴¹History. 2015. *Ho Chi Minh*. [online] dalam <http://www.history.com/topics/vietnam-war/ho-chi-minh>. [diakses pada 10 November 2016].

Pada tahun 1940 ketika perang dunia II Jerman dan Jepang mengambil alih wilayah yang dikuasai Perancis dan merebut kepemilikan Perancis di Indochina termasuk Vietnam namun pada tahun 1945 keadaan berbalik dengan Perancis mengambil alih kembali wilayah yang pernah dikuasai. Perancis kembali datang dan menguasai Vietnam menggunakan kapal Amerika Serikat untuk menyerang Vietnam selatan maupun Vietnam Utara yang saat itu telah terbagi menjadi dua wilayah semenjak Perancis menguasai wilayah tersebut. Pada tahun 1950 terjadilah perang dan mulai terlibatnya Amerika Serikat dengan mengirimkan tentaranya beserta personel CIA dan memasok pesawat terbang kepada Perancis⁴².

Pada awalnya, China tidak terlibat dalam perang yang terjadi di Vietnam. Keadaan itu berubah ketika China melihat Vietnam tengah mengalami revolusi komunis, maka para pemimpin partai komunis China seperti Mao Zedong, Zhou Enlai mulai memberikan perhatian pada komunis Vietnam. Para Pemimpin Partai Komunis (PKC) China melakukan pendekatan terhadap Ho Chi Minh sebagai pemimpin dari partai komunis Vietnam. Pemimpin partai komunis China Mao merasa hubungan dengan Ho Chi Minh tidak hanya terkait nilai-nilai dan ideologi yang sama tapi juga mengalami kesulitan yang sebanding selama revolusioner partai komunis di China sehingga Mao menawarkan bantuan dukungan moral maupun material selama perang di Indochina⁴³.

China melihat peluang untuk membuat Vietnam sebagai negara komunis sama seperti China dengan memberikan bantuan pada Vietnam yang sedang dilanda perang melawan Amerika Serikat. Secara hampir bersamaan pula, saat itu China dan Amerika Serikat baru saja terlibat perang di Korea pada tahun 1950 an. Sikap China terhadap Vietnam terkait dengan revolusi komunis adalah untuk menjaga keamanan nasional China di bagian selatan wilayahnya dan mengantisipasi intervensi dari Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer di wilayah Indochina yang akan mengancam China selain itu China juga

⁴²Xiaoming Zang. 1996. The Vietnam War, 1964-1969: A Chinese Perspective. *The Journal of Military History*. Vol. 60 No.4. Tahun 1996. Hal. 740.

⁴³Chen Tian.1995.*China's Involvement in The Vietnam War*. Cambridge: Cambridge University Press. Hal 359.

tidak ingin Amerika Serikat menghalangi perluasan pengaruh komunis di Indochina⁴⁴.

Vietnam dan China berupaya untuk menyelesaikan perang melalui konferensi di Jenewa, Swiss tahun 1954 namun hasil dari konferensi tidak memberikan hasil yang memuaskan dikarenakan wilayah Vietnam terbagi menjadi dua bagian yaitu Vietnam utara dan Vietnam selatan. Vietnam utara diserahkan pada Amerika Serikat sedangkan Vietnam selatan diserahkan pada partai komunis Vietnam padahal keinginan dari Vietnam adalah bersatunya kedua wilayah itu menjadi satu kekuasaan. Pada tahun 1958 ketika negosiasi dan jalur *soft power* tidak menemukan penyelesaian, maka revolusi Vietnam masih berlanjut. Vietnam memutuskan mengambil jalur militer untuk merebut Vietnam selatan dengan Vietnam utara yang dipakai sebagai dasar dukungan dari dunia internasional. Pada tahun 1959 dimulailah perang melawan Amerika Serikat dengan menggunakan senjata. Di perang inilah, China terlibat dalam upaya merebut Vietnam selatan. PKC China memberikan pengalamannya selama revolusi China untuk menghemat kekuatan militer dan tetap menjaga kedekatan dengan penduduk dan menunggu kesempatan untuk pemberontakan lokal dan China memberikan dukungan penuh pada Vietnam Utara untuk pembebasan Vietnam selatan.

Pada tahun 1955 China mulai membekali dan melatih tentara Vietnam dengan memberikan dukungan berupa 24.000 senjata, 15 pesawat, 28 kapal angkatan laut, 175 juta butir amunisi, dan peralatan militer lainnya. Pada tahun 1962 saja China menyediakan 90.000 senapan dan mesin senjata ke Vietnam utara selain itu, China juga memberikan bantuan makanan⁴⁵. Atas sikap China tersebut, Ho Chi Minh merasa bahwa Vietnam bisa percaya pada China terkait bantuan yang diberikan namun tetap waspada atas sikap baik China. jika dilihat dari sejarah, China pernah menguasai Vietnam pada saat dinasti Han dan berperang

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 383.

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 364.

dengan China⁴⁶. Perang antara Vietnam dan Amerika selatan terus berlanjut dan Amerika Serikat mempunyai inisiatif untuk melakukan embargo pada Vietnam utara di tahun 1964⁴⁷. Pada tahun 1965 Amerika Serikat terus melakukan operasi militer di Vietnam selatan dan menjatuhkan bom di Vietnam utara. Mulai terjadi protes antiperang dari warga Amerika Serikat dan Eropa atas sikap yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat ke wilayah Vietnam selain itu, bantuan pasokan senjata dari Uni Sofyet mulai datang.⁴⁸

Pada awal tahun 1969, perlahan lahan pasukan China mulai ditarik dari Vietnam utara karena untuk menghindari peningkatan ketegangan antara Amerika Serikat dengan China yang saat itu mulai diketahui bahwa China memberikan bantuan pada tentara Vietnam utara. Amerika Serikat tidak suka terhadap tindakan China tersebut dan mengancam akan perang dengan China sementara China tidak ingin terlibat perang lebih jauh dengan Amerika Serikat. Bantuan militer di Vietnam digantikan oleh Uni Soviet. Pada tahun 1973 Amerika Serikat mendukung dan menguasai Vietnam selatan dengan ibu kota Saigon sementara Vietnam utara didukung dan dikuasai oleh Uni Soviet. Pada tahun yang sama hingga tahun 1975 terjadi serangan antara tentara Vietnam utara dengan tentara Amerika Serikat. Akibat serangan tersebut, pemerintahan Saigon mulai tidak stabil dan akhirnya tahun 1976 Saigon berhasil dikuasai oleh tentara Vietnam utara dan terjadilah reunifikasi Vietnam⁴⁹.

2.1.3 Hubungan Vietnam-China terkait Laut China Selatan

Wilayah teritorial Laut China Selatan bersinggungan dengan batas teritorial laut beberapa negara oleh karena itu, wilayah ini menimbulkan perselisihan. Timbulnya perselisihan diakibatkan karena masing-masing negara belum mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah perbatasan teritorial. Masing-masing negara masih percaya bahwa batas teritorial wilayah Laut China

⁴⁶Phan Ke An. 2013. *Outline of Vietnamese History*. [online] dalam <http://www.nnn.se/vietnam/history.pdf>. [diakses pada 9 November 2016].

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

Selatan berdasarkan sejarah para pendahulu yang berhasil menguasai wilayah tersebut meskipun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berupaya menyelesaikan perselisihan melalui kesepakatan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 perselisihan tersebut masih belum terselesaikan hingga sekarang. Di Wilayah Laut China Selatan terdapat sekitar 3000 pulau-pulau kecil dan karang serta sumber daya alam yang jumlahnya melimpah. *The U.S Energy Information Administration* (EIA) terdapat sekitar 11 milyar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam di wilayah Laut China Selatan oleh karena itu, beberapa negara mengklaim kepemilikan dari wilayah teritorial Laut China Selatan untuk mendapatkan sumber daya alam di wilayah tersebut⁵⁰.

Negara-negara yang mengklaim wilayah Laut China Selatan adalah China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan. China adalah negara dengan pengklaim wilayah terluas yang telah melanggar kesepakatan konvensi hukum laut PBB. China telah mengklaim wilayah Laut China Selatan hampir 3,5 juta kilometer persegi⁵¹. China juga telah melakukan kegiatan membangun pulau-pulau diatas terumbu karang, memperkenalkan wilayah sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) sebagai wilayah kedaulatan China, mengadakan latihan militer, melakukan eksplorasi sumber daya alam di wilayah yang masih menjadi perselisihan diantara negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan China tersebut membuat perselisihan yang terjadi semakin tinggi intensitasnya salah satunya adalah dengan negara Vietnam.

Vietnam dan China memperebutkan Kepulauan Parcel dan Spratly yang menjadi bagian dari wilayah Laut China Selatan. Pada tahun 1979 militer Vietnam dan China pernah terlibat kontak senjata di kepulauan Parcel yang menyebabkan tewasnya serdadu militer kedua negara. Kontak senjata kembali terjadi di tahun

⁵⁰EIA. 2013. *South China Sea*. [online] dalam <https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=SCS>. [diakses pada 22 Agustus 2016].

⁵¹VOA Indonesia. 2016. *China adakan latihan militer di Laut China Selatan*. [online] dalam <http://www.voaindonesia.com/a/china-adakan-latihan-militer-di-laut-china-selatan/3422839.html> [diakses pada 22 Agustus 2016].

1988 di kepulauan yang juga menjadi perselisihan kedua negara yaitu di kepulauan Spratly⁵². Vietnam-China belum mencapai kesepakatan terkait perselisihan wilayah yang menjadi bagian kedaulatan teritorial kedua negara hingga menyebabkan ketegangan hubungan diantara negara yang bertetangga tersebut.

Ketegangan yang terjadi antara Vietnam dan China mengalami normalisasi hubungan pada tahun 1991. Hubungan diplomatik kedua negara membaik hingga tahun 1997 kembali mengalami perselisihan kedua negara. Hal itu terjadi karena China melakukan pengeboran eksplorasi minyak di landas kontinen Vietnam. Pada tahun 1998 China membangun satelit tanah di Paracel dan bilik telepon di Spratly. Vietnam dan China sempat berupaya menyelesaikan perselisihan tersebut melalui kesepakatan kode etik yang dilakukan antara ASEAN dengan China pada November 2002 namun pejabat Vietnam tidak sepenuhnya percaya pada China Vietnam tetap menegaskan bahwa kepulauan Spratly dan Paracel menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Vietnam⁵³.

Pada tahun 2011 hubungan diplomasi Vietnam-China mengalami peningkatan intensitas perselisihan terkait Laut China Selatan. Menurut pihak Vietnam, kapal patroli China telah memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan memotong kabel yang dipasang kapal survey Vietnam. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal China itu membuat Vietnam merasa China tidak menghormati wilayah kedaulatan Vietnam⁵⁴. Perselisihan itu terus berlanjut ke tahun-tahun berikutnya hingga pada puncaknya, di tahun 2014 terjadi aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat Vietnam yang ditujukan untuk China. Masyarakat Vietnam membakar toko, perusahaan multinasional China yang menyebabkan tewasnya pekerja Vietnam maupun China dan ratusan lainnya

⁵²Evelyn Goh. 2005. *Meeting The China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*. East-West Center Washington. Halaman 33-34.

⁵³ *Ibid.* Hal. 35

⁵⁴News Viva. 2014. *Laut China Selatan picu konflik China-Vietnam*. [online] dalam <http://m.news.viva.co.id/cangkang/ramadan2014/read/225832-china-vietnam-bersitegang-di-wilayah-sengketa>. [diakses pada 9 September 2016].

terluka⁵⁵. Penyebab terjadinya protes itu dilakukan terkait dengan kegiatan China yang menempatkan anjungan minyak lepas pantai milik perusahaan minyak yang bernama CNOOC. Anjungan minyak ditempatkan di lokasi yang berjarak 240 km dari pesisir Vietnam⁵⁶. Vietnam-China saling klaim wilayah Laut China Selatan hingga saat ini meskipun upaya untuk mengurangi intensitas perselisihan dilakukan pula oleh kedua negara.

2.2 Perekonomian Vietnam dan Kerjasama Regional Vietnam-China

Keadaan ekonomi Vietnam setelah terjadi reunifikasi Vietnam utara dan Vietnam selatan mengalami perubahan besar. Perubahan besar itu dimulai dari reformasi ekonomi Doi Moi yang dilakukan oleh partai komunis. Perubahan tersebut berdampak pada kebijakan ekonomi Vietnam yang menjadi lebih terbuka dengan pasar internasional sehingga bisa membuat perekonomian Vietnam semakin membaik. Vietnam mulai melakukan perdagangan dan kerjasama dengan negara lain serta menjadi anggota dari *World Trade Organization* (WTO), organisasi perdagangan dunia, APEC dan organisasi internasional lainnya serta melakukan kerjasama regional dengan negara tetangga di Asia Tenggara dan China.

2.2.1 Gambaran Ekonomi Vietnam

Sejak perang Vietnam berakhir tahun 1975, keadaan ekonomi Vietnam memasuki periode perkembangan yang lebih baik meskipun, masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh Vietnam ketika berada pada tahap pemulihan ekonomi. Tantangan tersebut adalah ketika runtuhnya Uni Soviet dan negara-negara sosialis Eropa Timur pada saat ekonomi Vietnam bergantung dan meniru model pembangunan ekonomi pada negara-negara sosialis Eropa Timur dan Uni Soviet. Peristiwa tersebut memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan sosial dan

⁵⁵VOA. 2011. *Vietnam Protes Beijing Soal Eksplorasi di Laut China Selatan*. [online] dalam <http://www.voaindonesia.com/content/vietnam-protes-beijing-soal-eksplorasi-di-laut-cina-selatan--127294318/96518.html>. [diakses pada 24 Januari 2016].

⁵⁶BBC. 2014. *Vietnam Anti- China Protest: Factories Burnt*. [online] dalam <http://www.bbc.com/news/world-asia-27403851>. [diakses pada 9 September 2016].

perkembangan pembangunan ekonomi Vietnam. Proses pembangunan ekonomi Vietnam setelah terjadinya perang dapat dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama adalah 10 tahun rencana ekonomi tahun 1975-1985 dan periode kedua adalah ketika tahun-tahun setelah ekonomi reformasi Vietnam menjadi lebih ke arah ekonomi yang diserahkan pada pasar hingga sekarang⁵⁷.

Pada tahun pertama setelah perang usai, pemerintah Vietnam harus fokus memulihkan kondisi negara terutama kondisi ekonomi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan pertanian serta peningkatan produksi untuk konsumen yang selama perang telah mengalami penurunan. Kebijakan ekonomi lebih memprioritaskan pada industri berat dan fokus pada revolusi hubungan-hubungan dari produksi dengan memperluas model mekanisme yang direncanakan terpusat di utara ke seluruh negara. prinsipnya adalah mensyaratkan nasionalisasi dan sentralisasi. Kepentingan pribadi rakyat tidak terpenuhi, dan momentum pembangunan ekonomi menjadi hilang. Sebagai akibatnya, meskipun beberapa fasilitas industri dibangun seperti memenuhi kebutuhan energi listrik, produksi semen, dan sektor lainnya ekonomi Vietnam masih stagnan. Hal tersebut dibuktikan oleh *Gross National Product* (GNP) rata-rata Vietnam adalah setengah dari tingkat pertumbuhan penduduk. Hasil tersebut jauh dari target yang ditetapkan oleh kongres nasional partai komunis Vietnam⁵⁸.

Pada tahun 1976-1980 terjadi resesi nasional. Pada situasi ini, kondisi pertanian Vietnam mengalami kemunduran dengan 80% dari populasi dan 70% dari angkatan kerja, hidup, bekerja, dan tergantung pada pertanian atau sektor terkait. Meskipun banyak yang menjadi buruh tani, produk hasil pertanian tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rata-rata makanan per kapita (diukur dalam beras) yang hanya mencapai 300 kg per tahun⁵⁹. Keadaan tersebut membuat pemerintah harus import ribuan ton makanan untuk mencukupi kebutuhan namun

⁵⁷Bui That Thang. 2000. *After The War: 25 Years of Economic Development in Vietnam*. Vietnam:Nira Review. Hal. 21.

⁵⁸ *Ibid.* Hal.23.

⁵⁹Socialist Republic of Vietnam. 2005. *Vietnam Economy Revertview*, [online] dalam <http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/TheSocialistRepublicOfVietnam/AboutVietnam/AboutVietnamDetail?categoryId=10000103&articleId=10000554> [diakses pada 27 Juli 2016].

masih tidak mencukupi dan terjadi lah wabah kelaparan. Hal yang terjadi adalah konsumsi lebih besar daripada pendapatan nasional dan menjadi ketergantungan dengan berbagai jenis bantuan asing serta mengalami defisit dalam neraca perdagangan. Terutama dalam hubungan perdagangan yang terjadi antara Vietnam dengan negara-negara sosialis Eropa Timur.

Dari hasil tersebut, disimpulkan bahwa rencana pembangunan ekonomi terpusat Vietnam setelah perang usai pada periode 10 tahun pertama jauh dari hasil yang diharapkan. Vietnam masih berada pada posisi negara yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Pengembangan industri yang dilakukan pemerintah tidak mampu membuat capaian yang maksimal bahkan resesi nasional terjadi pada tahun 1980. Hal tersebut membuat partai nasional komunis mengadakan kongres partai untuk merumuskan kebijakan baru dalam mengatasi permasalahan ekonomi Vietnam.

Kongres partai komunis yang ke-6 tahun 1986 menandakan titik balik yang signifikan dalam transformasi ekonomi (*Doi Moi*) Vietnam menjadi lebih terbuka, berorientasi pasar, dan lebih berintegrasi dengan model ekonomi dunia. Tujuan dari reformasi ini adalah menghilangkan subsidi negara, memperluas kepemilikan aset publik, mendorong dan merangsang perkembangan organisasi swasta, perorangan. Memberlakukan kebijakan untuk integrasi Vietnam ke dalam ekonomi dunia, mempercepat kegiatan perdagangan luar negeri, mendorong adanya investasi langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI). Transformasi yang dilakukan Vietnam ini berbeda dengan transformasi negara-negara sosialis di Eropa Timur.

Transformasi ekonomi yang terjadi di Vietnam tidak hanya fokus pada kontrol sumber daya negara dan stabilisasi ekonomi makro namun juga menekankan pada stabilitas sosial dan politik. Hal ini menjadi penting untuk penciptaan lingkungan yang menguntungkan untuk transformasi dan perkembangan ekonomi pasar di Vietnam. Sebagai negara yang penduduknya banyak bergantung pada sektor pertanian, pada tanggal 5 April 1988 Politbiro meluncurkan Resolusi 10-NQ / TW pada reformasi manajemen pertanian (disebut sistem Kontrak 10). Keluarga dari anggota koperasi menjadi entitas ekonomi.

Mereka memiliki hak mutlak untuk tanah mereka dan hasil yang mereka hasilkan. Terlepas dari tanah berdasarkan kontrak dan kontrak lainnya yang ditandatangani dengan koperasi, mereka kemudian diizinkan untuk aktif memproduksi dan melakukan bisnis dalam berbagai bentuk usaha dengan peluang yang tersedia. Resolusi ini mengisyaratkan titik balik dalam pembangunan pertanian di Vietnam.

Pada Maret 1989, Komite Sentral Partai merilis resolusi pada 12 kebijakan utama yang dirancang untuk memperkuat proses renovasi dengan penekanan pada isu-isu terpenting dengan menyesuaikan manajemen ekonomi, berkonsentrasi pada target utama tiga program ekonomi (produksi pertanian, barang-barang konsumen, dan ekspor). Secara konsisten melakukan kebijakan multi sektor ekonomi, mengembangkan semua kapasitas produksi, berfokus pada pasar, dan obyek perencanaan yang dibuat⁶⁰. Vietnam mendapatkan hasil yang signifikan dari resolusi yang telah dilakukan meskipun tingkat inflasi masih tinggi. Hasil tersebut dapat dilihat dari dua periode yaitu tahun 1986-1991 dan periode kedua dari tahun 1991-1996.

Pada periode pertama, hasil dari produksi pertanian mengalami peningkatan. Dari hasil produksi sebesar 17,5 juta ton (1987), 19,5 juta (1988) dan 20,5 juta (1989), setelah tahun 1989 merupakan tanda dari kebangkitan pertumbuhan produksi pertanian Vietnam yang menjadi salah satu negara dengan eksportir beras terbesar bersama dengan Thailand dan Amerika Serikat meskipun, Produk Domestik Produk (PDB) pertumbuhannya masih lambat. Tingkat pertumbuhan rata-rata 4,5%. Dari sektor 1 (perikanan, kehutanan, dan pertanian) adalah 2,7%, sektor II (Industri dan konstruksi) 5,7%, sektor III (jasa) 6,4% dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,09% atau 2,2 kali lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan PDB dan inflasi masih tinggi di 260,2 %. Pada periode kedua tahun 1991-1996, situasi ekonomi mulai menunjukkan hasil yang memuaskan dari reformasi kebijakan ekonomi. PDB meningkat per tahun dengan rata-rata 8,9%. Yakni sektor I meningkat sebesar 4,8%, sektor II 13,9%, sektor III 9,1% sementara itu, tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 2,15% atau 2,4 kali lebih kecil dari pertumbuhan PDB dan inflasi rata-rata 10,9%. Periode ini

⁶⁰ Bui That Hang. *Op Cit.* Hal 24.

merupakan periode stabil dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat disetiap sektor selain itu, kemiskinan juga berkurang, infrastruktur dibangun, sebagian besar warga telah memiliki listrik di rumahnya dan kualitas hidup warga meningkat⁶¹.

Keberhasilan Vietnam dalam meningkatkan taraf kehidupan warganya dan pertumbuhan ekonomi yang membaik, mulai mengalami penurunan di tahun 1998-1999. Hal itu diikuti dengan adanya krisis keuangan regional yang melanda negara-negara di Asia Tenggara. Meskipun krisis keuangan itu juga dapat berdampak pada perekonomian Vietnam, namun bukan satu-satunya penyebab terjadinya perlambatan ekonomi di Vietnam. Penelitian menyebutkan bahwa faktor struktural dan institutional, faktor-faktor yang berhubungan dengan proses pembangunan dalam ekonomi Vietnam yang menyebabkan perlambatan ekonomi. Pasar telah mengalami stagnasi dan produk tidak bisa dijual. Proses transisi ekonomi yang berorientasi pasar di Vietnam belum sepenuhnya sempurna. Kelompok bisnis di Vietnam masih belum mempunyai kualitas dan kemampuan bisnis yang baik, kekurangan seorang ekonom yang mempunyai pengetahuan profesional dan keterampilan untuk mengelola serta mengendalikan ekonomi makro- mikro dalam memprediksi peluang pasar. Pengembangan infrastruktur juga mengalami ketinggalan jauh dari negara-negara lainnya dalam satu regional Asia Tenggara dan negara tetangga terdekat seperti China, Korea dan Jepang.

Pemulihan ekonomi Vietnam dibutuhkan segera untuk mengembalikan prestasi dan keunggulan yang pernah dicapai. Pada tahun 2000, Vietnam membuat rencana nasional yang bertujuan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan dan untuk menghentikan penurunan beberapa tahun terakhir. Sumber daya domestik akan digunakan, investasi asing akan kembali ke Vietnam, perbaikan infrastruktur akan dilakukan dan membuat iklim bisnis di Vietnam menguat yang hasilnya akan berdampak pada perbaikan ekonomi warga. Pembangunan ekonomi Vietnam akan membuat langkah-langkah besar dan memberikan kontribusi positif untuk

⁶¹ *Ibid.* Hal. 22.

dinamika perkembangan di Asia Timur dan Asia Tenggara di tahun pertama dari abad dua puluh satu⁶².

Pada reformasi ekonominya, Vietnam juga memperbaiki hubungan kerjasama ekonomi dengan negara lain terutama negara tetangga di Asia Tenggara. Integrasi ekonomi regional dan kerjasama-kerjasama ekonomi mulai dilakukan oleh Vietnam. Kerjasama-kerjasama ekonomi dan perjanjian perdagangan itu dilakukan dengan beberapa negara pada tahun 1990. Tahun 1995 melakukan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa, bergabung dengan *Association of South East Asian Nation (ASEAN)*, dan *Asean Free Trade Area (AFTA)* tahun 1998 menjadi anggota *Asian Pasific Economic Cooperation (APEC)*. Pada tahun 2005 secara total Vietnam telah membuka kerjasama perdagangan dengan 221 negara. Di tahun 2006 Vietnam menjadi anggota *World Trade Organization (WTO)*. Selain kerjasama perdagangan, Vietnam juga kerjasama dengan negara lain untuk program pembangunan dalam negeri di abad 21. Pemerintah Vietnam juga merencanakan pembangunan yang lebih baik dinegaranya dengan membuat Vietnam menjadi negara industrialisasi⁶³.

Kerjasama tersebut dilakukan dengan negara tetangga terdekat Vietnam yaitu China. Sejak terjadi normalisasi hubungan dengan China tahun 1991, kedua negara telah memperluas kerjasama dalam berbagai bidang terutama ekonomi. Arus keluar masuk barang terjadi diantara kedua negara. China telah menjadi mitra dagang terbesar bagi Vietnam dalam 11 tahun terakhir. Pemimpin kedua negara telah beberapa kali melakukan pertemuan penting untuk membahas dokumen kerjasama yang menguntungkan dengan tujuan memperkuat tali persahabatan sebagai negara yang bertetangga dan menciptakan motivasi untuk meningkatkan hubungan untuk pembangunan diantara kedua negara di abad 21.

⁶²Andrew L. Odell dan Marlene F. Castillo. Vietnam in a Nutshell. 2008. An Historical, Political, and Commercial Overview. *NYSBA International Law Practicum*. Vol 21 No 2. Hal. 84.

⁶³ *Ibid.* Hal. 85.

2.2.2 Program Greater Mekong Subregion (GMS)

Program *Greater Mekong Subregion* (GMS) adalah sebuah inisiatif subregional yang dirancang untuk mempromosikan hubungan yang lebih erat dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di kawasan Mekong dengan jalan melakukan integrasi ekonomi diantara enam anggota yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan propinsi Yunnan, China.⁶⁴ Sebagai sebuah program yang berbasis integrasi, agenda GMS berkonsentrasi pada ketetapan infrastruktur fisik yang memiliki karakteristik barang publik seperti infrastruktur lintas batas diantara negara anggotanya. Konektivitas infrastruktur diwujudkan dengan sebuah jaringan jalan yang menghubungkan kawasan Mekong. Konektivitas tersebut akan mengurangi biaya transportasi masyarakat dan barang dari satu sudut wilayah ke sudut wilayah yang lain⁶⁵.

Sembilan sektor utama dalam program Greater Mekong Subregion terdiri dari pertanian, energi, pengelolaan lingkungan dan Sumber Daya Alam, pengembangan sumber daya manusia, investasi, telekomunikasi, pariwisata, transportasi. Aksesibilitas merupakan masalah utama di wilayah Greater Mekong, fokus awal dari proyek ini adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan infrastruktur transportasi di daerah untuk mengurangi hambatan fisik untuk perdagangan dan investasi. Proyek pembangunan ini dilakukan di sejumlah koridor ekonomi yang ditunjuk, yaitu Utara-Selatan, Timur-Barat dan Selatan. Sebagian besar partisipasi Cina dalam program pembangunan GMS terkonsentrasi di Koridor Utara-Selatan. Koridor ini membentang dari kota China bagian selatan yaitu Kunming di Provinsi Yunnan ke Bangkok. Ini mencakup provinsi berpenduduk jarang Luang Namtha di Laos utara, negara Shane di Myanmar bagian barat, dan kota-kota Thailand utara Chiang Rai, Chiang Mai dan Phitsanulok. Koridor Utara-Selatan juga mencakup wilayah tenggara dari

⁶⁴UNESCAP. 2000. *The Preparation of the Greater Mekong Subregion Business Handbook*. [online] dalam www.unescap.org/tid/publication/indpub2183.pdf [diakses pada 27 Juni 2016].

⁶⁵ *Ibid.*

Kunming ke Hanoi⁶⁶. Selain konektivitas infrastruktur jalan, konektivitas juga mencakup transmisi pengembangan fiber optic telekomunikasi dan transmisi tenaga.⁶⁷

Program GMS juga memiliki fasilitas investasi, perdagangan lintas batas, penambahan prosedur dan transparansi tentang izin pabean, pemberlakuan visa GMS tunggal yang mendukung serangkaian tindakan yang didesain untuk mempromosikan integrasi ekonomi dan pariwisata antar negara anggotanya.⁶⁸ Secara teknis, GMS merupakan suatu proyek pengembangan yang diinisiasi oleh *Asian Development Bank* dan mitra pembangunan lainnya pada tahun 1992 untuk membantu negara-negara kawasan Mekong Delta dalam mencapai Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) yang ditetapkan oleh PBB melalui konektivitas meningkat, meningkatkan daya saing, dan rasa komunitas yang lebih besar.⁶⁹ Namun dalam praktek pembangunan di subregion ini, China yang paling aktif dalam mendorong pembangunan di kawasan Mekong.

Pada November 2002, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GMS pertama kali diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja. KTT diselenggarakan untuk menyetujui kerangka strategis dalam pengembangan sepuluh tahun berikutnya dan menentukan bahwa KTT GMS akan diadakan setiap tiga tahun sekali. Maka, Kerjasama GMS naik ke tingkat puncak dan memasuki tahap baru. Pada KTT GMS yang kedua diselenggarakan pada tanggal 4-5 Juli 2005 di Kunming, China. Pada KTT kedua ini, keenam negara anggota dari GMS menandatangani sejumlah kerjasama dokumen meliputi fasilitas transportasi kargo dan penumpang, pencegahan dan pengendalian epidemi hewan, konstruksi jalan Raya dan kekuatan perdagangan, serta persetujuan sejumlah usulan kerjasama terkait isu-isu seperti

⁶⁶Lim Tin Seng. 2008. *China's Active Role in The Greater Mekong Sube-Region*. Singapore:East Asian Policy. Hal. 38.

⁶⁷*Ibid.* Hal. 40.

⁶⁸Nita Ferilia. 2013. *Upaya China untuk meningkatkan Hubungan dengan Negara-Negara Indochina*. Jember:Universitas Jember. Hal. 54.

⁶⁹*Ibid.* Hal. 65.

pembangunan koridor perlindungan keanekaragaman hayati dan kerangka aksi dari GMS untuk fasilitas perdagangan dan investasi⁷⁰.

Sejak pertemuan KTT GMS kedua, perdagangan bilateral antara China dengan negara-negara GMS lain telah mengalami kecenderungan perkembangan yang baik. Terdapat peningkatan perdagangan dan volume bilateral investasi yang cepat. China juga telah melakukan kontrak tenaga kerja dan konsultasi design dengan kelima negara anggota GMS yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan nilai kontrak selain itu China juga berpartisipasi dalam bentuk perusahaan patungan (*Joint Venture*) di kelima negara atau perusahaan-perusahaan China sendiri yang sangat membantu dalam pembangunan ekonomi dan zona kerjasama perdagangan di negara GMS lainnya termasuk Vietnam⁷¹.

2.2.3 Nilai Ekspor dan Impor Vietnam-China

China menjadi partner dagang Vietnam terbesar selama lima tahun terakhir melalui kegiatan ekspor-impor kedua negara. Komoditas ekspor dari Vietnam ke China meliputi tekstil, garmen, produk-produk ikan, produk pertanian (beras), produk-produk listrik, komputer, spare parts, bagian dari alat transportasi seperti ban sedangkan komoditas import meliputi handphone elektronik, komputer, produk-produk plastik, produk-produk kimia, besi dan baja, pakan ternak dan bahan dari pembuatan pakan ternak⁷². Dari tahun 2011-2015 nilai ekspor dan impor dalam bentuk dollar Amerika Serikat ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

⁷⁰NDRC. 2008. *Country Report on China's Participation in Greater Mekong Subregion*. [online] dalam http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/200804/t20080430_208063.html. [diakses pada 29 November 2016].

⁷¹ *Ibid.*

⁷²Vietnam Cumtoms. 2016. *Preliminary assessment of Vietnam international merchandise trade performance in August and the 8 months of 2016*. [online] dalam <http://www.customs.gov.vn/Lists/EnglishStatistics/ViewDetails.aspx?ID=611&Category=Scheduled%20analysis&Group=Trade%20news%20%26%20Analysis&language=en-US>. [diakses pada 8 November 2016].

Tabel 2.1 Nilai Ekspor dan Impor Vietnam-China 2011-2015

No	Tahun	Ekspor	Impor
1.	2011	\$ 11,613,323,632	\$ 24,866,391,546
2.	2012	\$ 12,835,975,642	\$ 29,034,966,032
3.	2013	\$ 13,177,694,493	\$ 36,886,477,896
4.	2014	\$ 14,928,317,706	\$ 43,647,568,868
5.	2015	\$ 16,567,685,858	\$ 49,441,123,233
	Jumlah	\$ 69,122,997,331	\$ 183,876,527,575

Sumber : diolah dari *United Nation Comtrade Database*

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai ekspor China ke Vietnam selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal yang sama juga terjadi pada nilai impor dari China ke Vietnam. Jika dilihat dari tabel, impor China ke Vietnam lebih besar dengan jumlah \$183,876,527,575 daripada nilai ekspor Vietnam ke China dengan jumlah \$69,122,997,331. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Vietnam, China adalah partner dagang yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri sedangkan bagi China, Vietnam adalah pasar internasional yang dapat memberikan keuntungan bagi produk China dengan melakukan impor ke Vietnam.

Selain kegiatan ekspor dan impor, China juga melakukan *Foreign Direct Investment* (FDI) di Vietnam. China merupakan partner tradisional Vietnam selain dari negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia yang menanamkan investasinya. Jika dilihat dari tahun 2013, FDI China di Vietnam sebesar 10,65%. Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 8,65% menjadi 2% tetapi pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 1% menjadi 3%. Ha Noi adalah tujuan investasi terbesar dari para investor dengan total investasi sebesar 243,51 Million USD diikuti wilayah Dong Nai dengan nilai investasi 183,03 Million USD, Ho

Chi Minh dengan nilai investasi 163,43 Million USD, Tay Ninh dengan nilai investasi 160,1 Million USD , Bac Ninh dengan nilai investasi 143,7⁷³.



⁷³ Vietnam Briefing.2016. *Vietnam's FDI Outlook for 2016: Trends and Opportunities*. [online] dalam <http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnamese-fdi-2016-outlook.html>. [diakses pada 9 November 2016].

BAB 3. KERJASAMA SREB DAN MSR ANTARA VIETNAM DAN CHINA

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai gambaran umum Vietnam dan dinamika hubungan dengan China. Pada bab tersebut terdapat penjelasan mengenai gambaran umum geografi dan perekonomian Vietnam yang diawali dari setelah reunifikasi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan hingga sekarang selain itu juga dijelaskan mengenai dinamika hubungan Vietnam - China yang mengalami pasang surut terutama berkaitan dengan perselisihan klaim wilayah Laut China Selatan. Meski begitu, Vietnam dan China melakukan kerjasama regional yang juga melibatkan negara lain yakni Myanmar, Laos, Kamboja di kawasan sungai Mekong yang diberi nama Program *Greater Mekong Subregion* (GMS). Hubungan ekonomi yang menyangkut transaksi perdagangan kedua negara juga dijelaskan dalam bab tersebut.

Pada bab tiga ini akan menjelaskan mengenai kerjasama dalam *The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR)* yang digagas oleh China di tahun 2013. Pada bab ini akan terbagi menjadi dua sub bab yakni yang pertama adalah menjelaskan mengenai prinsip dasar dan framework serta prioritas kerjasama dalam inisiatif SREB dan MSR. Pada sub bab kedua akan dijelaskan mengenai pandangan Vietnam terhadap kerjasama tersebut.

Presiden China Xi Jinping pertama kali mengumumkan *The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR)* ketika melakukan kunjungan ke Kazakhtan pada tahun 2013 di Universitas Nazarbayev⁷⁴. Beberapa aksi atau kegiatan dilakukan oleh pemerintah China untuk mempromosikan dan memperkenalkan inisiatif SREB dan MSR pada dunia internasional. Salah satunya adalah kunjungan yang dilakukan presiden China Xi Jinping ke beberapa negara di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika untuk memperkenalkan inisiatif SREB dan MSR kepada pemerintah di negara-negara

⁷⁴Xinhuanet. 2015. *Chronology of China's Belt and Road Initiative*, [online] dalam http://news.xinhuanet.com/english/2015-03/28/c_134105435.htm, [diakses pada 13 September 2016].

kawasan yang akan dilalui jalur inisiatif SREB dan MSR yang diharapkan negara-negara tersebut mau bergabung.

3.1 Kerjasama Vietnam-China dalam *The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR) China*

Pada 28 Maret 2015 pemerintah China melalui laman website resmi departemen Pembangunan Nasional dan Komisi Reformasi merilis dokumen “*vision and actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road*” secara resmi ke dunia internasional. Pejabat publik China sejak saat itu dalam forum internasional mulai memperkenalkan dan mengajak untuk bergabung terutama negara-negara di kawasan Asia, Eropa, Afrika ke dalam inisiatif SREB dan MSR. Seperti yang di lakukan oleh Penasihat negara Yang Jiechi dalam pidatonya di pertemuan China-ASEAN *Maritime Cooperation* yang dihadiri oleh negara-negara ASEAN maupun dalam kunjungan yang dilakukan oleh presiden Xi Jinping ke beberapa negara yang diharapkan ikut mendukung dan bergabung ke dalam inisiatif SREB dan MSR⁷⁵.

3.1.1 Prinsip Dasar dan Framework Dari *The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR)*

Inisiatif SREB dan MSR sejalan dengan tujuan dan prinsip dari piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu menjunjung tinggi lima prinsip koeksistensi damai. Ke lima prinsip itu adalah saling menghormati satu sama lain kedaulatan dan integritas teritorial, saling non-agresi, saling tidak campur tangan di masing-masing urusan internal, kesetaraan dan saling menguntungkan, hidup berdampingan secara damai oleh karena itu inisiatif ini terbuka untuk kerjasama yang tidak terbatas hanya pada daerah jalur sutra. Negara yang berada di luar jalur sutra juga di perbolehkan untuk bergabung selain itu juga terbuka untuk

⁷⁵ *Ibid.*

organisasi internasional maupun regional sehingga hasil dari upaya bersama akan menguntungkan banyak pihak yang terlibat⁷⁶.

Kerjasama dalam inisiatif akan berjalan secara harmonis dan inklusif yang mendukung toleransi antar peradaban, mendukung dialog antar peradaban yang berbeda, menghormati cara dan model pembangunan yang digunakan oleh berbagai negara sehingga mampu untuk menggambarkan kekuatan masing-masing negara. Kerjasama yang berkaitan dengan ekspor-import barang akan mengikuti pasar dengan mematuhi aturan-aturan pasar dan norma-norma internasional. Transaksi tersebut akan berusaha untuk saling menguntungkan dengan mengakomodasi berbagai kepentingan sehingga akan menghasilkan kerjasama yang memperhatikan dan fokus pada kepentingan dari semua pihak yang terlibat. Hasilnya, diharapkan dalam kerjasama inisiatif ini semua negara dapat hidup berdampingan dalam damai untuk kesejahteraan bersama.

Pemerintah China sebagai perintis dari *The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR)* menganjurkan perdamaian dan kerjasama, keterbukaan dan inklusivitas, saling belajar dan saling menguntungkan. Mempromosikan kerjasama praktis di segala bidang, dan bekerja untuk membangun sebuah komunitas kepentingan bersama, menampilkan kepercayaan politik bersama, integrasi ekonomi dan inklusivitas budaya. Pada kerjasama yang terjalin dalam inisiatif, negara yang tergabung harus bekerja dan bergerak menuju tujuan saling menguntungkan dan menciptakan keamanan bersama. Secara lebih spesifik, diperlukan juga peningkatan infrastruktur yang aman dan efisien untuk jalur darat, laut, udara sehingga bisa meningkatkan konektivitas. Peningkatan konektivitas merupakan fasilitas untuk perdagangan dan investasi sehingga dapat membentuk jaringan kawasan perdagangan yang memenuhi standar tinggi, mempertahankan hubungan ekonomi yang lebih erat dan memperdalam kepercayaan politik. Ada dampak lain pula yang ditimbulkan dari peningkatan konektivitas yaitu adanya pertukaran budaya

⁷⁶NDRC. 2015. *Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road*. [online] dalam http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html. [diakses pada 1 Oktober 2016].

yang mendorong peradaban berbeda untuk saling belajar dan berkembang bersama-sama, mempromosikan saling pengertian, perdamaian dan persahabatan di antara orang-orang dari semua negara.

Pengembangan konektivitas dengan infrastruktur dan transportasi melalui benua Asia, Eropa dan Afrika yang menghubungkan lingkaran ekonomi Asia Timur dan lingkaran ekonomi Eropa meliputi negara-negara yang sangat potensial untuk pengembangan ekonomi. *The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR)* dibagi menjadi dua bagian yaitu The Silk Road Economic Belt yang fokus pada menyatukan Cina, Asia Tengah, Rusia dan Eropa (Baltik), menghubungkan Cina dengan Teluk Persia dan Laut Mediterania melalui Asia Tengah dan Asia Barat, dan menghubungkan Cina dengan Asia Tenggara, Asia Selatan dan Samudera Hindia sedangkan *21-Century Maritime Silk Road* dirancang dari pantai China ke Eropa melalui Laut Cina Selatan dan Samudera Hindia di satu rute, dan dari pantai China melalui Laut Cina Selatan ke Pasifik Selatan yang lain⁷⁷.

Pada implementasinya, *The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR)* terdapat pengembangan dua jalur yaitu jalur darat dan jalur laut. Di jalur darat, akan berfokus pada pembangunan jembatan yang menghubungkan Eropa-Asia (*Eurasian Land Bridge*), pengembangan jalur China-Mongolia-Rusia, China-Asia Tengah-Asia Barat, dan China-Indochina Peninsula dengan menggunakan koridor ekonomi yang mengambil keuntungan dari rute transportasi internasional. Platform yang digunakan dalam pengembangan jalur tersebut adalah dengan membangun kompleks industri di kawasan inti kota dari masing-masing negara. Sementara itu di laut, akan fokus bersama-sama membangun rute transportasi yang aman dan efisien. Rute transportasi yang menghubungkan pelabuhan utama di sepanjang jalur rute⁷⁸.

Pada November 2015 Vietnam memutuskan untuk bergabung dalam *The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

Road (MSR) yang digagas oleh China. Sesuai dengan tujuan dalam inisiatif tersebut yakni meningkatkan konektivitas antar negara-negara disepanjang jalur inisiatif sehingga dapat membantu mempromosikan kemakmuran ekonomi dari negara-negara di sepanjang jalur inisiatif. China dan Vietnam juga menandatangani dokumen studi kelayakan pembangunan rel kereta api yang pembangunannya dibiayai oleh China. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh China di wilayah Vietnam adalah jalur rel kereta api dari Propinsi Lao Chai yang akan melewati ibu kota Vietnam Hanoi dan berakhir di Hai Phong. Hai Phong merupakan wilayah yang dekat dengan taman industri yang didalamnya didominasi oleh perusahaan-perusahaan China⁷⁹. Selain itu juga menjadi gerbang yang menghubungkan China dengan Vietnam dimana terdapat Bandar Udara (bandara) Noi Bai dan juga pelabuhan Hai Phong. Bandara Noi Bai adalah bandara internasional di Vietnam sedangkan pelabuhan Hai Phong bisa menjadi tempat untuk menyeberang dari Vietnam ke daratan lain China yakni Hainan.

3.1.2 Prioritas Kerjasama *The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR)*

Negara yang berada di sepanjang jalur inisiatif SREB dan MSR memiliki keunggulan sumber daya mereka sendiri dan ekonomi mereka saling melengkapi. Oleh karena itu, ada potensi besar dan ruang untuk kerjasama. Negara-negara tersebut harus meningkatkan koordinasi kebijakan, fasilitas konektivitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan dan *people-to-people bonds* serta memperkuat kerjasama dalam bidang utama berikut⁸⁰ :

⁷⁹Xinhuanet. 2015. China,Vietnam Agree on Feasibility Study of Railway Project. [online] dalam http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/06/c_134791099.htm [diakses pada 1 Oktober 2016].

⁸⁰NDRC. 2015. *Vision and Action on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road*. [online] dalam http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html. [diakses pada 1 Oktober 2016].

- Koordinasi Kebijakan

Meningkatkan koordinasi kebijakan merupakan jaminan penting untuk pelaksanaan inisiatif. Mempromosikan kerjasama antar pemerintah, memperluas kepentingan bersama, meningkatkan kepercayaan politik bersama, dan mencapai konsensus kerjasama baru. Negara sepanjang jalur mengkoordinasikan strategi pembangunan ekonomi dan kebijakan, bekerja di luar rencana dan langkah-langkah untuk kerjasama regional, bernegosiasi untuk memecahkan masalah kerjasama yang terkait, dan bersama-sama memberikan dukungan kebijakan untuk pelaksanaan proyek-proyek kerjasama praktis dan skala besar sehingga bisa menghasilkan sebuah kerjasama yang lebih erat.

- Fasilitas Konektivitas

Konektivitas merupakan area yang penting bagi inisiatif SREB dan MSR tanpa menghiraukan pada kedaulatan negara dan keamanan masing-masing. Negara-negara di sepanjang jalur inisiatif harus meningkatkan konektivitas pembangunan infrastruktur. bersama-sama mendorong pembangunan lorong bagasi internasional, dan membentuk jaringan infrastruktur yang menghubungkan semua sub -regions di Asia, dan antara Asia, Eropa dan Afrika langkah demi langkah. Pada saat yang sama, harus dilakukan upaya untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur hijau yang rendah karbon dan manajemen operasi dengan mempertimbangkan penuh dampak perubahan iklim terhadap pembangunan. Berkenaan dengan pembangunan infrastruktur, harus fokus pada jalan atau lorong-lorong utama serta memberikan prioritas lebih pada jalan yang belum terkoneksi. Diharapkan dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut, dapat menghilangkan hambatan transportasi, memajukan fasilitas keselamatan jalan dan meningkatkan konektivitas.

Konektivitas yang dibangun tersebut juga terkait untuk penyaluran energi dengan berkonsentrasi pada keamanan jaringan pipa minyak dan gas. Konektivitas juga menyangkut pembangunan jaringan listrik dan rute daya transmisi lintas batas sehingga dapat bekerja sama meningkatkan jaringan listrik regional.

Peningkatan dalam hal informasi juga menjadi suatu hal yang penting oleh karena itu, pembangunan kabel optik lintas batas juga dilakukan. Konektivitas dalam hal informasi dapat meningkatkan konektivitas komunikasi internasional, dan menciptakan Informasi mengenai jalur sutra. Pembangunan bilateral lintas batas jaringan kabel optik pada kecepatan yang lebih cepat, rencana proyek kabel optik kapal selam antar benua, dan meningkatkan tata ruang (satelit) informasi untuk memperluas pertukaran informasi dan kerjasama.

- Perdagangan Tanpa Hambatan

Investasi dan kerjasama perdagangan adalah tugas utama dalam inisiatif dengan berusaha untuk meningkatkan investasi dan fasilitasi perdagangan, menghapus hambatan investasi dan perdagangan untuk penciptaan lingkungan bisnis yang sehat di kawasan dan di semua negara yang terkait. Pembicaraan mengenai pembukaaan kawasan perdagangan bebas dengan negara yang berada di sepanjang jalur inisiatif akan segera di bahas sehingga dapat mengeluarkan potensi dan memperluas kerjasama. Pada pelaksanaan dari kerjasama perdagangan juga memastikan untuk menerapkan perjanjian yang telah disepakati di organisasi Internasional yang membahas tentang perdagangan yaitu WTO (World Trade Organization). Peningkatan fasilitas bea cukai di pelabuhan juga menjadi perhatian, membentuk “*single window*” di pelabuhan yang berbatasan dengan negara lain dengan mengurangi biaya bea cukai, serta dapat ditingkatkan dengan level yang tanpa biaya bea cukai untuk barang-barang yang berada di pelabuhan.

Investasi menjadi hal yang penting untuk dibahas terkait kerjasama perdagangan. Setiap negara pasti mempunyai keinginan untuk menarik para investor untuk bisa berinvestasi di negaranya oleh karena itu diperlukan fasilitas untuk mempercepat investasi, menghilangkan hambatan investasi, dan mendorong untuk melakukan perundingan tentang perjanjian perlindungan investasi bilateral dan perjanjian penghilangan perpajakan ganda untuk melindungi hak-hak hukum dan kepentingan investor serta memperluas area investasi. Adanya penghilangan hambatan-hambatan dan perlindungan terhadap kepentingan investor akan semakin memudahkan untuk investor melakukan investasi.

Kerjasama dalam berbagai bidang juga ditingkatkan. Kerjasama di bidang pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan, manufaktur mesin pertanian dan produk pertanian, dan mempromosikan kerjasama dalam produk laut, pengolahan produk akuatik, desalinasi air laut, biofarmasi laut, rekayasa teknologi, industri perlindungan lingkungan, wisata bahari dan bidang lainnya. Peningkatan kerjasama juga dilakukan dalam kegiatan eksplorasi sumber daya alam dan pengembangan batubara, minyak, gas, mineral, logam dan sumber energi konvensional lainnya. Memajukan kerjasama untuk tenaga air, tenaga nuklir, tenaga angin, tenaga surya dan sumber energi terbarukan yang bersih lainnya. Meningkatkan kerjasama dalam pengolahan dan konversi energi dan sumber daya. Di dekat lokasi yang dieksplorasi, tercipta sebuah rantai industri yang terintegrasi dari kerjasama energi dan sumber daya dengan peningkatan kerjasama teknologi untuk pengolahan, peralatan dan jasa di bidang energi dan sumber daya.

Sesuai dengan prinsip-prinsip saling melengkapi dan saling menguntungkan, negara sepanjang jalur inisiatif harus mendorong kerjasama dalam industri yang sedang berkembang di negara berkembang utamanya. Hal yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan distribusi rantai industri. Adanya peningkatan distribusi rantai industri akan mendorong seluruh rantai industri dan industri terkait untuk mengembangkan produksi dan pemasaran sistem, meningkatkan daya dukung industri dan daya saing industri daerah. Salah satu caranya adalah bekerja sama untuk membangun segala bentuk taman industri seperti zona kerja sama ekonomi dan perdagangan luar negeri, lintas batas zona kerja sama ekonomi termasuk di Vietnam telah dibangun taman industri oleh pengusaha China di propinsi Bac Giang. China sebagai perintis dari inisiatif ini menyambut perusahaan dari semua negara untuk berinvestasi di China, dan mendorong perusahaan China untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di negara-negara lain di sepanjang jalur inisiatif, dan membuat investasi industri di wilayah tersebut. Perusahaan investasi China mendukung operasi lokal dan manajemen perusahaan China untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja serta meningkatkan mata pencaharian penduduk setempat. Pembangunan industri yang dilakukan secara besar-besaran tersebut

juga harus memperhatikan dan melestarikan lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati, mengatasi perubahan iklim, dan bergandengan tangan untuk membuat Jalan Sutra yang ramah lingkungan.

- Integrasi Keuangan

Integrasi keuangan merupakan pondasi penting untuk melaksanakan inisiatif SREB dan MSR. Kerjasama dilakukan untuk membangun sistem stabilitas mata uang, sistem investasi, pembiayaan dan kredit sistem informasi di Asia. China akan mendukung upaya pemerintah negara-negara di sepanjang jalur inisiatif dan perusahaan terkait serta lembaga keuangan dengan kredit yang memudahkan untuk menerbitkan obligasi Renminbi di China. Lembaga keuangan dan perusahaan China yang berkualitas didorong untuk menerbitkan obligasi di kedua mata uang Renminbi dan asing di luar China. Dana-dana tersebut kemudian akan dikumpulkan ke dalam *silk road fund* yang merupakan sebuah lembaga yang fungsinya adalah untuk membiayai atau membantu pembangunan infrastruktur di negara sepanjang jalur inisiatif. Vietnam memperoleh bantuan untuk pembangunan infrastruktur melalui jalur kereta api yang menghubungkan Vietnam-China. China telah mempersiapkan dana sebesar US\$40 milyar untuk mendirikan *silk road fund* yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas dengan China⁸¹.

- People to People Bonds

Kerja sama yang terjalin dalam inisiatif tidak hanya melibatkan *Government to government* tetapi juga *non government Organization* (NGO), masyarakat, pengusaha, media sehingga kerja sama menjadi semakin erat dengan banyak pihak yang terlibat dan semakin terintegrasi. Keterlibatan masyarakat dalam kerja sama inisiatif dapat membuat adanya pertukaran budaya, bahasa, informasi. Pemerintah China telah menyediakan 10.000 kuota beasiswa untuk para pelajar di negara sepanjang jalur inisiatif untuk belajar di universitas-

⁸¹Silkroadfund. 2015. *shareholder structure silk road fund*, [online] dalam <http://www.silkroadfund.com.cn/enweb/23775/23767/index.html>, [diakses pada 1 Oktober 2016].

universitas di China. Negara-negara di sepanjang jalur inisiatif juga menjalin kerja sama yang berbasis media seperti pertukaran program televisi maupun radio, produksi dan penerjemahan dalam film-film.

Pergerakan masyarakat dari satu negara ke negara lain sepanjang jalur inisiatif seperti melakukan perjalanan wisata juga semakin dipermudah dengan kemudahan dalam mengajukan visa turis serta bersama-sama menciptakan rute wisata internasional yang kompetitif. Vietnam adalah salah satu negara tetangga China yang memiliki kunjungan turis dari China terbesar. Di tahun 2007, China menyumbang sepertiga dari total wisatawan asing yang berkunjung ke Vietnam. Sebaliknya, warga Vietnam yang berwisata ke China mengalami peningkatan secara bertahap sekitar 20 ribu wisatawan Vietnam ke China tiap tahunnya. Sektor pendidikan juga terdapat sekitar 7000 pelajar Vietnam yang belajar di China dan ada 40 universitas di Vietnam yang telah melakukan kerjasama dan penelitian bersama dengan 20 universitas dan institut di China.

Kesehatan masyarakat tidak luput menjadi perhatian penting oleh karena itu, peningkatan kerja sama dilakukan untuk mengatasi berbagai macam penyakit endemik seperti penelitian, pertukaran informasi dan teknologi untuk pengobatan ataupun pencegahan dilakukan untuk menangani berbagai macam penyakit. Peningkatan kerja sama dalam pembangunan laboratorium bersama atau pusat penelitian menjadi hal yang penting untuk dilakukan terkait kesehatan pada masyarakat. Pemerintah China akan memberikan bantuan medis dan bantuan medis darurat pada negara yang terkena darurat kesehatan masyarakat. Negara-negara sepanjang jalur inisiatif akan bekerja sama praktis dalam penanganan kesehatan ibu dan anak, rehabilitasi cacat, dan terutama untuk penyakit menular seperti *Tuberculosis* (TBC), AIDS, dan malaria serta memperluas kerja sama pada pengobatan tradisional.

3.2 Pandangan Vietnam terhadap *The Initiative of The Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st Century Maritime Silk Road (MSR)*

Inisiatif SREB dan MSR sangat erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur yang mengutamakan konektivitas. Pemerintah China telah

menyediakan dana untuk membantu negara-negara yang berkembang utamanya yang bersedia bergabung dalam SREB dan MSR untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu negara berkembang yang juga menjadi negara tetangga dekat China adalah Vietnam. Vietnam memutuskan untuk bergabung dalam inisiatif SREB dan MSR tentunya dengan cara pemerintah Vietnam melihat prinsip dasar dan framework dalam kerjasama inisiatif SREB dan MSR. Pandangan Vietnam terhadap inisiatif SREB dan MSR dilihat dari 2 hal yaitu Pembangunan *Two Corridors, One Economic Circle* dan Rencana Pembangunan Sosial Ekonomi 2011-2020.

3.2.1 Pembangunan *Two Corridors, One Economic Circle plan*

Pada tahun 2004 pemerintah Vietnam mengawali pembentukan *two corridors, one economic circle*. *Two Corridors, One Economic Circle* adalah sebuah inisiatif yang diusulkan pertama kali oleh perdana menteri Vietnam Nguyen Phu Trong terkait pembangunan koridor-koridor ekonomi yang menghubungkan Vietnam dan China. Pembangunan koridor-koridor ekonomi tersebut akan berdampak pada sektor politik dan sosial bagi hubungan kedua negara. Terdapat latar belakang yang mendasari dari inisiatif ini dilihat dari sejarah hubungan Vietnam-China setelah normalisasi hubungan. Latar belakang yang pertama adalah adanya kedekatan secara sosial, politik terutama geografi dan selama ini, Vietnam-China belum memanfaatkan secara maksimal potensi tersebut dan belum dipromosikan. Dilihat berdasarkan letak geografisnya, kedua negara dihubungkan dan dikelilingi oleh sungai-sungai dan pegunungan di kawasan Indochina selain itu kedua negara mempunyai ideologi dan budaya yang mirip.

Latar belakang yang kedua adalah dalam hal kerjasama ekonomi. Di tahun 2007, volume perdagangan bilateral USD 15 milyar, meningkat pesat dibandingkan dengan tahun 1991. China menjadi mitra dagang terkemuka Vietnam terus-menerus selama 4 tahun. Dari segi investasi, China telah memiliki 561 proyek di Vietnam dengan modal total USD 1,87 milyar. Dalam hal bantuan keuangan, total bantuan China ke Vietnam sebesar USD 312 juta. Latar belakang

ketiga adalah kerjasama budaya, pendidikan dan sektor lain. Pada sektor pariwisata, China menyumbang sepertiga dari total wisatawan asing yang berkunjung ke Vietnam. Sebaliknya, warga Vietnam yang berwisata ke China mengalami peningkatan secara bertahap sekitar 20 ribu wisatawan Vietnam ke China tiap tahunnya. Sektor pendidikan juga terdapat sekitar 7000 pelajar Vietnam yang belajar di China dan ada 40 universitas di Vietnam yang telah melakukan kerjasama dan penelitian bersama dengan 20 universitas dan institut di China⁸².

Latar belakang yang keempat adalah dalam hal wilayah. Pada tahun 1999, kedua belah pihak menandatangani Perjanjian Perbatasan dan di tahun 2000, menandatangani Perjanjian Perikanan Kerjasama di teluk Tonkin. Vietnam-China berusaha untuk menyelesaikan masalah perbatasan wilayah teluk tonkin dalam rangka membangun Vietnam-China menjadi perbatasan daerah yang "damai, ramah dan co operasional". Kedua belah pihak akan berusaha dengan baik melaksanakan Perjanjian Kerjasama demarkasi teluk tonkin dan kesepakatan di Teluk Tonkin, melaksanakan pemeriksaan bersama di zona perikanan, survei bersama sumber daya perikanan dan patroli angkatan laut bersama. Kedua belah pihak akan mempercepat pelaksanaan persetujuan kerangka kerja tentang minyak dan gas bumi kerjasama di zona teluk tonkin.

Pada tahun 2004 perdana menteri Vietnam Nguyen Phu Throng melakukan kunjungan persahabatan ke China. Pada kunjungan tersebut sekaligus pemerintah Vietnam mengusulkan inisiatif *two corridors one economic circle* pada pemerintah China dan presiden China pada saat itu Hu Jintao mendukung inisiatif yang sedang diusulkan oleh pemerintah Vietnam. Hubungan Vietnam dan China telah memperoleh prestasi yang luar biasa, namun hubungan antara kedua belah pihak tidak komprehensif dan harmoni antar sektor. Faktanya, hubungan ekonomi belum cocok dengan pembangunan dalam kaitannya politik, potensi dari kedua negara belum sepenuhnya dieksploitasi, posisi geografis yang dekat , politik dan keuntungan kesamaan budaya antara kedua negara belum

⁸² Institut of Chinese Studies. 2009. *Vietnam-China Relations and Building The Two Corridors, One Economic Circle*. University of Malaya:Institut of China Studies hal. 2.

dipromosikan. Dalam hal perdagangan, volume perdagangan bilateral telah meningkat dengan cepat, namun Vietnam memiliki defisit perdagangan yang terus meningkat dengan China. Menurut data statistik perdagangan China pada tahun 2007, volume defisit Vietnam dalam perdagangan dengan China sebesar USD 8,6 miliar. Dalam hal investasi, investasi Vietnam ke Cina mencapai volume yang sangat kecil, FDI China ke Vietnam juga sederhana dan kualitas proyek investasi tidak tinggi⁸³.

Pemerintah Vietnam dan China menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) untuk menyepakati beberapa sektor kerjasama dalam inisiatif *two corridors and one circle*⁸⁴. Kerjasama ini menjadi perhatian dari para pengamat seperti ahli akademik, peneliti di Vietnam untuk melihat prospek dari *two corridors, one economic circle*. Hasil pengamatan dari para ahli tersebut menyatakan bahwa *Two corridors, one economic circle* akan memberikan banyak manfaat bagi Vietnam seperti pengurangan kemiskinan dengan adanya lapangan pekerjaan baru, secara politik membuat kedua negara menjalin persahabatan yang lebih erat, mengembangkan kerjasama dan pembangunan namun terdapat kekurangan dari *two corridors, one circle economics* ini yaitu kurangnya modal infrastruktur sosial-ekonomi hal ini akan berkaitan dengan terhambatnya berpindahannya barang dari Vietnam ke China sehingga untuk bisa menghasilkan kerjasama yang *win win solution*, maka Pertama, infrastruktur, kedua negara perlu meningkatkan jalan yang menghubungkan Youyi Guan dengan Hai Phong dan Lao Cai di mana dapat menjadi jalan raya. Bersama jalan lalu lintas, Vietnam juga harus meningkatkan rel kereta api di daerah koridor. Ini adalah cara untuk memajukan pertukaran perdagangan antara kedua negara. Bahkan, sistem pelabuhan di Hai Phong, Quang Ninh, Lao Cai dan sebagainya perlu ditingkatkan dan dibangun kembali⁸⁵.

⁸³ *Ibid.* Hal. 4

⁸⁴ *Ibid.* Hal. 3.

⁸⁵ Vietnam Briefing.2016. *Vietnam's FDI Outlook for 2016: Trends and Opportunities*. [online] dalam <http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnamese-fdi-2016-outlook.html>. [diakses pada 9 November 2016].

Pembangunan koridor-koridor ekonomi akan berdampak pada konektivitas yang semakin mudah dengan perbaikan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur akan berdampak pada investasi-investasi langsung di negara tersebut. China merupakan partner tradisional Vietnam selain dari negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia yang menanamkan investasinya. Ha Noi adalah tujuan investasi terbesar dari para investor dengan total investasi sebesar 243,51 milyar USD diikuti wilayah Dong Nai dengan nilai investasi 183,03 milyar USD, Ho Chi Minh dengan nilai investasi 163,43 milyar USD, Tay Ninh dengan nilai investasi 160,1 milyar USD, Bac Ninh dengan nilai investasi 143,7 milyar USD⁸⁶.

3.2.2 Rencana Pembangunan Strategi Sosial Ekonomi Vietnam 2011-2020

Pemerintah Vietnam pada tahun 2011 membuat rencana strategi Pembangunan Sosial Ekonomi untuk dilaksanakan selama 10 tahun ke depan. Rencana strategi pembangunan merupakan kelanjutan dari 10 tahun sebelumnya yang dinilai telah berhasil dengan perolehan Gross Domestic Product (GDP) rata-rata sebesar 7,26% tiap tahun. Hingga tahun 2010, GDP per kapita mencapai US\$ 1,168. Perekonomian Vietnam mengalami perkembangan positif dengan nilai produksi yang meningkat dan pembangunan ekonomi terbuka mengikuti pasar. Vietnam telah masuk kedalam kelompok negara-negara berkembang dengan pendapatan menengah⁸⁷.

Pada rencana Pembangunan Strategi Sosial Ekonomi Vietnam, terdapat tujuan yang ingin dicapai yaitu menjadi negara industri pada tahun 2020 untuk mewujudkan tujuan tersebut, Vietnam membuat beberapa orientasi dan inovasi dalam pengembangan ekonomi maupun sosial salah satunya adalah dengan memperbaiki infrastruktur terutama sarana transportasi untuk mendukung tujuan Vietnam menjadi negara industri di tahun 2020⁸⁸. Pemerintah Vietnam berkonsentrasi pada sumber daya untuk investasi pembangunan jalan, kereta api berkecepatan tinggi rute utara-selatan, beberapa pelabuhan dan bandara dengan

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Vietnam Development Report. 2012. *Market Economy For A Middle Income Vietnam*. Vietnam: Vietnam Government. Hal.10.

⁸⁸ *Ibid.* Hal. 11.

standar internasional. Infrastruktur di perkotaan seperti Hanoi dan Ho Chi Minh juga menjadi perhatian pemerintah.

Pemerintah Vietnam mendorong dan menciptakan kondisi untuk komponen-komponen ekonomi bahkan investasi asing untuk bergabung dalam pembangunan infrastruktur melalui beberapa jenis investasi. Selain fokus pada perbaikan infrastruktur, pemerintah juga merencanakan pengembangan industri dan membangun negara menuju ke arah modernitas serta meningkatkan kualitas dan daya saing⁸⁹. Pemerintah Vietnam menyediakan zona industri di beberapa wilayah di Vietnam. Pemerintah Vietnam juga sangat mengembangkan industri jasa untuk mencapai tingkat pertumbuhan PDB yang lebih tinggi. Berkonsentrasi pada pengembangan beberapa industri jasa yang menguntungkan yang memiliki pengetahuan dan teknologi canggih seperti: pariwisata, maritim, penerbangan, telekomunikasi, teknologi informasi, dan kesehatan.

Pengembangan wilayah dengan membentuk koridor-koridor ekonomi juga menjadi agenda dari Strategi Pembangunan Sosial Ekonomi Vietnam. Koridor-koridor ekonomi dibentuk dengan membentuk koneksi yang luas di infrastruktur untuk membentuk poros ekonomi Utara-Selatan, poros ekonomi Timur-Barat, dan trans koridor ekonomi Asia. Koridor-koridor tersebut akan membentuk suatu area yang berdekatan dari kelompok produk industri dan jasa untuk menghubungkan daerah pusat perkotaan serta untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan di gerbang perbatasan dengan negara lain pada koridor ekonomi.

⁸⁹ Vietnam Development Report. 2014. *Skilling Up Vietnam: Preparing The Workforce for a Modern Market Economy*. Vietnam: Vietnam Government. Hal. 6.

BAB 5. KESIMPULAN

Dalam proses pengambilan keputusan pemerintah Vietnam akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam inisiatif SREB dan MSR. Keputusan bergabung tersebut merupakan alternatif yang diambil oleh pembuat keputusan di Vietnam. Keputusan itu diambil pada situasi yang mempengaruhi pembuat keputusan. Pembuat keputusan di Vietnam mempersepsikan dua faktor yang berpengaruh dalam pembuat keputusan yakni adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yakni menyangkut kebutuhan Vietnam terhadap investasi asing langsung. Investasi asing langsung akan berpengaruh pada kondisi ekonomi Vietnam dan mewujudkan cita-cita Vietnam menjadi negara industri dan modern di tahun 2020.

Faktor internal yang lainnya adalah kondisi geografi Vietnam yang berbatasan langsung dengan Vietnam. Kondisi geografis Vietnam yang berbatasan langsung dengan China tentunya akan memberikan peluang untuk bisa mengembangkan pembangunan sebuah jalur infrastruktur yang menghubungkan Vietnam dengan China. Inisiatif SREB dan MSR sejalan dengan inisiatif yang dibuat oleh Vietnam yakni *two corridors, one economic circle* dimana pembangunan koridor-koridor ekonomi sedang gencar dilakukan didalam negeri untuk memudahkan akses ekonomi.

Faktor eksternal yang berpengaruh adalah aksi dari Pemerintah China yang Telah Mempromosikan dan Mengajak Negara-negara Lain Bergabung dalam Inisiatif. Beberapa negara di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika telah menyatakan bergabung dalam inisiatif. Bergabungnya beberapa negara ini memperluas kesempatan kerjasama Vietnam dengan negara-negara lainnya disepanjang jalur inisiatif. Faktor eksternal lainnya adalah kerjasama *Greater Mekong Subregion* (GMS) yang Telah Dilakukan Sebelumnya dengan China. Kerjasama subregional yang telah dijalin oleh Vietnam-China dalam GMS dapat dilanjutkan dan

diperbaharui dengan kesepakatan yang baru dalam setiap sektor pada kerjasama inisiatif SREB dan MSR yang dapat memberikan keuntungan pada Vietnam.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa, meskipun hubungan China dan Vietnam tidak selamanya harmonis yang dapat dilihat dari sejarah hubungan kedua negara dimasa lampau dan peningkatan ketegangan hubungan di tahun 2014 terkait klaim Laut China Selatan, kedua negara masih menjalin kerjasama dan berhubungan baik. Hal itu terkait dengan kebutuhan kedua negara untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan pembangunan yang saling menguntungkan. China dan Vietnam mampu meredam dan menghentikan sementara perselisihan terkait klaim Laut China Selatan dengan melakukan sebuah kerjasama inisiatif SREB dan MSR yang terjalin di tahun 2015 yang lebih memberikan manfaat bagi kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- Bui That Thang. 2000. *After The War: 25 Years of Economic Development in Vietnam*. Vietnam:Nira Review.
- Carlsnaes,Walter, Risse Thomas,Simmons Beth A.2013.*Handbook Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Chen Tian.1995.*China's Involvement in The Vietnam War*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dacy, Douglas C. 1986. *Foreign, War, and Economic Development*. Cambridge:Cambridge University Press.
- Goh,Evelyn.2005. *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*.Washington,D.C:East-West Center Washiongton.
- Holsti, K.J. dan M. Tahir Azhari. 1983.*Politik Internasional Kerangka untuk Analisis*.Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Mas'oed, Mohtar.1990. *Ilmu Hubungan Internasional disiplin dan Metodologi*. Jakarta:LP3ES.
- OECD. 2002. *Foreign Direct Investment for Development*. Paris: OECD Publication Service.
- Prof.Dr.Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.Bandung:Penerbit Alfabeta.
- Seng Lim Tin. 2008. *China's Active Role in The Greater Mekong Sube-Region*. Singapore:East Asian Policy.
- Snyder C. Richard, H.W. Bruck, and Burton Sapin. 1962. *The Decision Making Approach to The Study of International Politics* Dalam James N. Rosenau. *International Politics and Foreign Policy*. New York:The Free Press.
- Varma, S.P.1990. *Teori Politik Modern*. Jakarta:Rajawali.

William D. Coplin.1992. *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: CV.Sinar Baru Bandung.

Jurnal :

Andrew L. Odell dan Marlene F. Castillo.2008. *Vietnam in a Nutshell: An Historical,Political,and Commercial Overview*. NYSBA International Law Practicum. Vol 21 No 2.

Nguyen Dinh Liem. 2015. *China FDI in Vietnam*. Vietnam Social Science. Vol 4 No 6.

Xiaoming, Zang . 1996. The Vietnam War, 1964-1969: A Chinese Perspective. *The Journal of Military History*. Vol. 60 No.4.

Tulisan Tidak Dipublikasikan

Sumaatmadja dalam Siti Nuraisyah Dewi. 2009. *Perkembangan Konsep Wilayah Pinggiran Kota dan Penerapannya di Departemen Geografi Universitas Indonesia*. Skripsi pada jurusan FMIPA Universitas Indonesia.

Ferilia, Nita. 2013. *Upaya China untuk meningkatkan Hubungan dengan Negara-Negara Indochina*. Skripsi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember.

Internet :

Aaron Hill. 2013. What is Foreign Investment? Definition & Example. [online] dalam <http://study.com/academy/lesson/what-is-a-foreign-investment-definition-examples.html>[diakses pada 10 September 2016]

BBC. 2014. *Vietnam Anti- China Protest: Factories Burnt*. [online] dalam <http://www.bbc.com/news/world-asia-27403851>. [diakses pada 9 September 2016]

Cnn Indonesia.2014.*Tiongkok Bertekad Perbaiki Hubungan dengan Vietnam*. <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141226141709-10620610/tiongkok-bertekad-perbaiki-hubungan-dengan-vietnam/>.[diakses pada 11 Maret 2016].

- EIA. 2013. *South China Sea*. [online] dalam <https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=SCS>. [diakses pada 22 Agustus 2016].
- Embassy of The Socialist Republic of Vietnam in The United States of America, Geography, <http://vietnamembassy-usa.org/vietnam/geography>, [diakses pada 20 Juli 2016].
- http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html. diakses pada [11 Maret 2016].
- Kompasiana.2016.*Kebangkitan Vietnam dan Dampaknya Terhadap Indonesia*. http://www.kompasiana.com/charanata/kebangkitan-vietnam-dan-dampaknya-terhadap-indonesia_5715d17ce122bd1e050cf829. [diakses pada 22 April 2016].
- Leuserantara.2014.*Vietnam Serukan Gerakan Anti China*. <http://leuserantara.com/vietnam-serukan-gerakan-anti-cina/#sthash.YMJ7SZi.dpuf> [diakses pada 11 Maret 2016].
- Mingjiang Li.2015. *Mengelola Isu keamanan di Laut China Selatan*. <http://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-cina-selatan-dari-doc-ke-coc/>. [diakses pada 12 Maret 2016].
- National Development and Reform Commission People's Republic of China.2015.*Vision and Action on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road*. http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html. [diakses pada 10 Oktober 2016].
- NDRC. 2008. *Country Report on China's Participation in Greater Mekong Subregion*. [online] dalam http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/200804/t20080430_208063.html. [diakses pada 29 November 2016]
- NDRC. 2015. *Vision and Action on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road*. [online] dalam http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html. [diakses pada 1 Oktober 2016].

- News Viva. 2011. *Laut China Selatan picu konflik China-Vietnam*.
<http://m.news.viva.co.id/cangkang/ramadan2014/read/225832-china-vietnam-bersitegang-di-wilayah-sengketa>, [diakses pada 13 Maret 2016].
- News Viva. 2014. *Laut China Selatan picu konflik China-Vietnam*. [online] dalam
<http://m.news.viva.co.id/cangkang/ramadan2014/read/225832-china-vietnam-bersitegang-di-wilayah-sengketa>. [diakses pada 9 September 2016].
- Okezone. 2015. 02 September 1945, Hari Kemerdekaan Vietnam. <http://news.okezone.com/read/2015/09/02/18/1207014/2-september-1945-hari-kemerdekaan-vietnam>. [diakses pada 22 April 2016].
- Phan Ke An. 2013. *Outline of Vietnamese History*. [online] dalam
<http://www.nnn.se/vietnam/history.pdf>. [diakses pada 9 November 2016].
- Republika. 2013. *Menundukkan Sang Naga*.
<http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/09/21/nv0rok23-menundukkan-sang-naga>. [diakses pada 24 April 2016].
- Sejarah Bangsa Vietnam. 2012. <http://www.informasi-vietnam.com/2012/10/sejarah-bangsa-vietnam.html> diakses pada 18 Mei
- Silkroadfund, 2015, *shareholder structure silk road fund*,
<http://www.silkroadfund.com.cn/enweb/23775/23767/index.html>, [diakses pada 1 Oktober 2016].
- Sindonews. 2014. *China Tangguhkan Kerjasama Bilateral dengan Vietnam*.
<http://international.sindonews.com/read/864702/40/china-tangguhkan-kerjasama-bilateral-dengan-vietnam-1400405513>. [diakses pada 11 Maret 2016].
- Socialist Republic of Vietnam. 2005. *Vietnam Economy Review*, [online] dalam
<http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/TheSocialistRepublicOfVietnam/AboutVietnam/AboutVietnamDetail?categoryId=10000103&articleId=10000554> [diakses pada 27 Juli 2016].
- Socialist Republic of Vietnam Government Portal. 2015. *Overview on Vietnam Geography*. [online] dalam

<http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/TheSocialistRepublicOfVietnam/AboutVietnam/AboutVietnamDetail?categoryId=10000103&articleId=10000505>, [diakses pada 10 Mei 2016].

- Trading Economy.2014.*China GDP*.
<http://www.tradingeconomics.com/china/gdp>. [diakses pada 22 April 2016].
- UNESCAP. 2000. *The Preparation of the Greater Mekong Subregion Business Handbook*. [online] dalam www.unescap.org/tid/publication/indpub2183.pdf [diakses pada 27 Juni 2016]
- Vietnam Briefing.2016. *Vietnam's FDI Outlook for 2016: Trends and Opportunities*.<http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnamese-fdi-2016-outlook.html>. [diakses pada 9 November 2016]
- Vietnam Briefing.2016. *Vietnam's FDI Outlook for 2016: Trends and Opportunities*.<http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnamese-fdi-2016-outlook.html>. [diakses pada 9 November 2016]
- Vietnam Cumtoms. 2016. *Preliminary assessment of Vietnam international merchandise trade performance in August and the 8 months of 2016*.
<http://www.customs.gov.vn/Lists/EnglishStatistics/ViewDetails.aspx?ID=611&Category=Scheduled%20analysis&Group=Trade%20news%20%26%20Analysis&language=en-US>. [diakses pada 8 November 2016].
- VOA Indonesia. 2016. *China adakan latihan militer di Laut China Selatan*. [online] dalam <http://www.voaindonesia.com/a/china-adakan-latihan-militer-di-laut-china-selatan/3422839.html> [diakses pada 22 Agustus 2016].
- VOA. 2011. *Vietnam Protes Beijing Soal Eksplorasi di Laut China Selatan*. [online] dalam <http://www.voaindonesia.com/content/vietnam-protos-beijing-soal-eksplorasi-di-laut-cina-selatan--127294318/96518.html>,[diakses pada 24 Januari 2016].

- VOA.2011. *Vietnam Protes Beijing Soal Eksplorasi di Laut China Selatan*.
<http://www.voaindonesia.com/content/vietnam-protas-beijing-soal-eksplorasi-di-laut-cina-selatan--127294318/96518.html>. [diakses pada 24 Januari 2016].
- Xinhuanet. 2015. China, Vietnam Agree on Feasibility Study of Railway Project. [online] dalam http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/06/c_134791099.htm [diakses pada 1 Oktober 2016].
- Xinhuanet. 2015. *Chronology of China's Belt and Road Initiative*, [online] dalam http://news.xinhuanet.com/english/2015-03/28/c_134105435.htm, [diakses pada 13 September 2016].
- Xinhuanet.2015. *China, Vietnam agree on feasibility study of railway project*.
http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/06/c_134791099.htm. [diakses pada 14 Januari 2017].
- World Bank. 2015. GDP Vietnam. <http://data.worldbank.org/country/vietnam>. [diakses pada 26 Februari 2017].

LAMPIRAN



**National Development and Reform Commission (NDRC)
People's Republic of China**

Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road

2015/03/28

Issued by the National Development and Reform Commission,
Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of
Commerce of the People's Republic of China,
with State Council authorization

March 2015

First Edition 2015

Contents

Preface
I. Background
II. Principles
III. Framework
IV. Cooperation Priorities
V. Cooperation Mechanisms
VI. China's Regions in Pursuing Opening-Up
VII. China in Action
VIII. Embracing a Brighter Future Together

Preface

More than two millennia ago the diligent and courageous people of Eurasia explored and opened up several routes of trade and cultural exchanges that linked the major civilizations of Asia, Europe and Africa, collectively called the Silk Road by later generations. For thousands of years, the Silk Road Spirit – "peace and cooperation, openness and inclusiveness, mutual learning and mutual benefit" – has been passed from generation to generation, promoted the progress of human civilization, and contributed greatly to the prosperity and development of the countries along the Silk Road. Symbolizing communication and cooperation between the East and the West, the Silk Road Spirit is a historic and cultural heritage shared by all countries around the world.

In the 21st century, a new era marked by the theme of peace, development, cooperation and mutual benefit, it is all the more important for us to carry on the Silk Road Spirit in face of the weak recovery of the global economy, and complex international and regional situations.

When Chinese President Xi Jinping visited Central Asia and Southeast Asia in September and October of 2013, he raised the initiative of jointly building the Silk Road Economic Belt and the 21st-Century Maritime Silk Road (hereinafter referred to as the Belt and Road), which have attracted close attention from all over the world. At the China-ASEAN Expo in 2013, Chinese Premier Li Keqiang emphasized the need to build the Maritime Silk Road oriented towards ASEAN, and to create strategic propellers for hinterland development. Accelerating the building of the Belt and Road can help promote the economic prosperity of the countries along the Belt and Road and regional economic cooperation, strengthen exchanges and mutual learning between different civilizations, and promote world peace and development. It is a great undertaking that will benefit people around the world.

The Belt and Road Initiative is a systematic project, which should be jointly built through consultation to meet the interests of all, and efforts should be made to integrate the development strategies of the countries along the Belt and Road. The Chinese government has drafted and published the Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road to promote the implementation of the Initiative, instill vigor and vitality into the ancient Silk Road, connect Asian, European and African countries more closely and promote mutually beneficial cooperation to a new high and in new forms.

I. Background

Complex and profound changes are taking place in the world. The underlying impact of the international financial crisis keeps emerging; the world economy is recovering slowly, and global development is uneven; the international trade and investment landscape and rules for multilateral trade and investment are

undergoing major adjustments; and countries still face big challenges to their development.

The initiative to jointly build the Belt and Road, embracing the trend towards a multipolar world, economic globalization, cultural diversity and greater IT application, is designed to uphold the global free trade regime and the open world economy in the spirit of open regional cooperation. It is aimed at promoting orderly and free flow of economic factors, highly efficient allocation of resources and deep integration of markets; encouraging the countries along the Belt and Road to achieve economic policy coordination and carry out broader and more in-depth regional cooperation of higher standards; and jointly creating an open, inclusive and balanced regional economic cooperation architecture that benefits all. Jointly building the Belt and Road is in the interests of the world community. Reflecting the common ideals and pursuit of human societies, it is a positive endeavor to seek new models of international cooperation and global governance, and will inject new positive energy into world peace and development.

The Belt and Road Initiative aims to promote the connectivity of Asian, European and African continents and their adjacent seas, establish and strengthen partnerships among the countries along the Belt and Road, set up all-dimensional, multi-tiered and composite connectivity networks, and realize diversified, independent, balanced and sustainable development in these countries. The connectivity projects of the Initiative will help align and coordinate the development strategies of the countries along the Belt and Road, tap market potential in this region, promote investment and consumption, create demands and job opportunities, enhance people-to-people and cultural exchanges, and mutual learning among the peoples of the relevant countries, and enable them to understand, trust and respect each other and live in harmony, peace and prosperity.

China's economy is closely connected with the world economy. China will stay committed to the basic policy of opening-up, build a new pattern of all-round opening-up, and integrate itself deeper into the world economic system. The Initiative will enable China to further expand and deepen its opening-up, and to strengthen its mutually beneficial cooperation with countries in Asia, Europe and Africa and the rest of the world. China is committed to shouldering more responsibilities and obligations within its capabilities, and making greater contributions to the peace and development of mankind.

II. Principles

The Belt and Road Initiative is in line with the purposes and principles of the UN Charter. It upholds the Five Principles of Peaceful Coexistence: mutual respect for each other's sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, mutual non-interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefit, and peaceful coexistence.

The Initiative is open for cooperation. It covers, but is not limited to, the area of the ancient Silk Road. It is open to all countries, and international and regional organizations for engagement, so that the results of the concerted efforts will benefit wider areas.

The Initiative is harmonious and inclusive. It advocates tolerance among civilizations, respects the paths and modes of development chosen by different countries, and supports dialogues among different civilizations on the principles of seeking common ground while shelving differences and drawing on each other's strengths, so that all countries can coexist in peace for common prosperity.

The Initiative follows market operation. It will abide by market rules and international norms, give play to the decisive role of the market in resource allocation and the primary role of enterprises, and let the governments perform their due functions.

The Initiative seeks mutual benefit. It accommodates the interests and concerns of all parties involved, and seeks a conjunction of interests and the "biggest common denominator" for cooperation so as to give full play to the wisdom and creativity, strengths and potentials of all parties.

III. Framework

The Belt and Road Initiative is a way for win-win cooperation that promotes common development and prosperity and a road towards peace and friendship by enhancing mutual understanding and trust, and strengthening all-round exchanges. The Chinese government advocates peace and cooperation, openness and inclusiveness, mutual learning and mutual benefit. It promotes practical cooperation in all fields, and works to build a community of shared interests, destiny and responsibility featuring mutual political trust, economic integration and cultural inclusiveness.

The Belt and Road run through the continents of Asia, Europe and Africa, connecting the vibrant East Asia economic circle at one end and developed European economic circle at the other, and encompassing countries with huge potential for economic development. The Silk Road Economic Belt focuses on bringing together China, Central Asia, Russia and Europe (the Baltic); linking China with the Persian Gulf and the Mediterranean Sea through Central Asia and West Asia; and connecting China with Southeast Asia, South Asia and the Indian Ocean. The 21st-Century Maritime Silk Road is designed to go from China's coast to Europe through the South China Sea and the Indian Ocean in one route, and from China's coast through the South China Sea to the South Pacific in the other.

On land, the Initiative will focus on jointly building a new Eurasian Land Bridge and developing China-Mongolia-Russia, China-Central Asia-West Asia and China-Indochina Peninsula economic corridors by taking advantage of

international transport routes, relying on core cities along the Belt and Road and using key economic industrial parks as cooperation platforms. At sea, the Initiative will focus on jointly building smooth, secure and efficient transport routes connecting major sea ports along the Belt and Road. The China-Pakistan Economic Corridor and the Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor are closely related to the Belt and Road Initiative, and therefore require closer cooperation and greater progress.

The Initiative is an ambitious economic vision of the opening-up of and cooperation among the countries along the Belt and Road. Countries should work in concert and move towards the objectives of mutual benefit and common security. To be specific, they need to improve the region's infrastructure, and put in place a secure and efficient network of land, sea and air passages, lifting their connectivity to a higher level; further enhance trade and investment facilitation, establish a network of free trade areas that meet high standards, maintain closer economic ties, and deepen political trust; enhance cultural exchanges; encourage different civilizations to learn from each other and flourish together; and promote mutual understanding, peace and friendship among people of all countries.

IV. Cooperation Priorities

Countries along the Belt and Road have their own resource advantages and their economies are mutually complementary. Therefore, there is a great potential and space for cooperation. They should promote policy coordination, facilities connectivity, unimpeded trade, financial integration and people-to-people bonds as their five major goals, and strengthen cooperation in the following key areas:

Policy coordination

Enhancing policy coordination is an important guarantee for implementing the Initiative. We should promote intergovernmental cooperation, build a multi-level intergovernmental macro policy exchange and communication mechanism, expand shared interests, enhance mutual political trust, and reach new cooperation consensus. Countries along the Belt and Road may fully coordinate their economic development strategies and policies, work out plans and measures for regional cooperation, negotiate to solve cooperation-related issues, and jointly provide policy support for the implementation of practical cooperation and large-scale projects.

Facilities connectivity

Facilities connectivity is a priority area for implementing the Initiative. On the basis of respecting each other's sovereignty and security concerns, countries along the Belt and Road should improve the connectivity of their infrastructure

construction plans and technical standard systems, jointly push forward the construction of international trunk passageways, and form an infrastructure network connecting all sub-regions in Asia, and between Asia, Europe and Africa step by step. At the same time, efforts should be made to promote green and low-carbon infrastructure construction and operation management, taking into full account the impact of climate change on the construction.

With regard to transport infrastructure construction, we should focus on the key passageways, junctions and projects, and give priority to linking up unconnected road sections, removing transport bottlenecks, advancing road safety facilities and traffic management facilities and equipment, and improving road network connectivity. We should build a unified coordination mechanism for whole-course transportation, increase connectivity of customs clearance, reloading and multimodal transport between countries, and gradually formulate compatible and standard transport rules, so as to realize international transport facilitation. We should push forward port infrastructure construction, build smooth land-water transportation channels, and advance port cooperation; increase sea routes and the number of voyages, and enhance information technology cooperation in maritime logistics. We should expand and build platforms and mechanisms for comprehensive civil aviation cooperation, and quicken our pace in improving aviation infrastructure.

We should promote cooperation in the connectivity of energy infrastructure, work in concert to ensure the security of oil and gas pipelines and other transport routes, build cross-border power supply networks and power-transmission routes, and cooperate in regional power grid upgrading and transformation.

We should jointly advance the construction of cross-border optical cables and other communications trunk line networks, improve international communications connectivity, and create an Information Silk Road. We should build bilateral cross-border optical cable networks at a quicker pace, plan transcontinental submarine optical cable projects, and improve spatial (satellite) information passageways to expand information exchanges and cooperation.

Unimpeded trade

Investment and trade cooperation is a major task in building the Belt and Road. We should strive to improve investment and trade facilitation, and remove investment and trade barriers for the creation of a sound business environment within the region and in all related countries. We will discuss with countries and regions along the Belt and Road on opening free trade areas so as to unleash the potential for expanded cooperation.

Countries along the Belt and Road should enhance customs cooperation such as information exchange, mutual recognition of regulations, and mutual assistance in law enforcement; improve bilateral and multilateral cooperation in the fields of

inspection and quarantine, certification and accreditation, standard measurement, and statistical information; and work to ensure that the WTO Trade Facilitation Agreement takes effect and is implemented. We should improve the customs clearance facilities of border ports, establish a "single-window" in border ports, reduce customs clearance costs, and improve

customs clearance capability. We should increase cooperation in supply chain safety and convenience, improve the coordination of cross-border supervision procedures, promote online checking of inspection and quarantine certificates, and facilitate mutual recognition of Authorized Economic Operators. We should lower non-tariff barriers, jointly improve the transparency of technical trade measures, and enhance trade liberalization and facilitation.

We should expand trading areas, improve trade structure, explore new growth areas of trade, and promote trade balance. We should make innovations in our forms of trade, and develop cross-border e-commerce and other modern business models. A service trade support system should be set up to consolidate and expand conventional trade, and efforts to develop modern service trade should be strengthened. We should integrate investment and trade, and promote trade through investment.

We should speed up investment facilitation, eliminate investment barriers, and push forward negotiations on bilateral investment protection agreements and double taxation avoidance agreements to protect the lawful rights and interests of investors.

We should expand mutual investment areas, deepen cooperation in agriculture, forestry, animal husbandry and fisheries, agricultural machinery manufacturing and farm produce processing, and promote cooperation in marine-product farming, deep-sea fishing, aquatic product processing, seawater desalination, marine biopharmacy, ocean engineering technology, environmental protection industries, marine tourism and other fields. We should increase cooperation in the exploration and development of coal, oil, gas, metal minerals and other conventional energy sources; advance cooperation in hydropower, nuclear power, wind power, solar power and other clean, renewable energy sources; and promote cooperation in the processing and conversion of energy and resources at or near places where they are exploited, so as to create an integrated industrial chain of energy and resource cooperation. We should enhance cooperation in deep-processing technology, equipment and engineering services in the fields of energy and resources.

We should push forward cooperation in emerging industries. In accordance with the principles of mutual complementarity and mutual benefit, we should promote in-depth cooperation with other countries along the Belt and Road in new-generation information technology, biotechnology, new energy technology, new

materials and other emerging industries, and establish entrepreneurial and investment cooperation mechanisms.

We should improve the division of labor and distribution of industrial chains by encouraging the entire industrial chain and related industries to develop in concert; establish R&D, production and marketing systems; and improve industrial supporting capacity and the overall competitiveness of regional industries. We should increase the openness of our service industry to each other to accelerate the development of regional service industries. We should explore a new mode of investment cooperation, working together to build all forms of industrial parks such as overseas economic and trade cooperation zones and cross-border economic cooperation zones, and promote industrial cluster development. We should promote ecological progress in conducting investment and trade, increase cooperation in conserving eco-environment, protecting biodiversity, and tackling climate change, and join hands to make the Silk Road an environment-friendly one.

We welcome companies from all countries to invest in China, and encourage Chinese enterprises to participate in infrastructure construction in other countries along the Belt and Road, and make industrial investments there. We support localized operation and management of Chinese companies to boost the local economy, increase local employment, improve local livelihood, and take social responsibilities in protecting local biodiversity and eco-environment.

Financial integration

Financial integration is an important underpinning for implementing the Belt and Road Initiative. We should deepen financial cooperation, and make more efforts in building a currency stability system, investment and financing system and credit information system in Asia. We should expand the scope and scale of bilateral currency swap and settlement with other countries along the Belt and Road, open and develop the bond market in Asia, make joint efforts to establish the Asian Infrastructure Investment Bank and BRICS New Development Bank, conduct negotiation among related parties on establishing Shanghai Cooperation Organization (SCO) financing institution, and set up and put into operation the Silk Road Fund as early as possible. We should strengthen practical cooperation of China-ASEAN Interbank Association and SCO Interbank Association, and carry out multilateral financial cooperation in the form of syndicated loans and bank credit. We will support the efforts of governments of the countries along the Belt and Road and their companies and financial institutions with good credit-rating to issue Renminbi bonds in China. Qualified Chinese financial institutions and companies are encouraged to issue bonds in both Renminbi and foreign currencies outside China, and use the funds thus collected in countries along the Belt and Road.

We should strengthen financial regulation cooperation, encourage the signing of MOUs on cooperation in bilateral financial regulation, and establish an efficient regulation coordination mechanism in the region. We should improve the system of risk response and crisis management, build a regional financial risk early-warning system, and create an exchange and cooperation mechanism of addressing cross-border risks and crisis. We should increase cross-border exchange and cooperation between credit investigation regulators, credit investigation institutions and credit rating institutions. We should give full play to the role of the Silk Road Fund and that of sovereign wealth funds of countries along the Belt and Road, and encourage commercial equity investment funds and private funds to participate in the construction of key projects of the Initiative.

People-to-people bond

People-to-people bond provides the public support for implementing the Initiative. We should carry forward the spirit of friendly cooperation of the Silk Road by promoting extensive cultural and academic exchanges, personnel exchanges and cooperation, media cooperation, youth and women exchanges and volunteer services, so as to win public support for deepening bilateral and multilateral cooperation.

We should send more students to each other's countries, and promote cooperation in jointly running schools. China provides 10,000 government scholarships to the countries along the Belt and Road every year. We should hold culture years, arts festivals, film festivals, TV weeks and book fairs in each other's countries; cooperate on the production and translation of fine films, radio and TV programs; and jointly apply for and protect World Cultural Heritage sites. We should also increase personnel exchange and cooperation between countries along the Belt and Road.

We should enhance cooperation in and expand the scale of tourism; hold tourism promotion weeks and publicity months in each other's countries; jointly create competitive international tourist routes and products with Silk Road features; and make it more convenient to apply for tourist visa in countries along the Belt and Road. We should push forward cooperation on the 21st-Century Maritime Silk Road cruise tourism program. We should carry out sports exchanges and support countries along the Belt and Road in their bid for hosting major international sports events.

We should strengthen cooperation with neighboring countries on epidemic information sharing, the exchange of prevention and treatment technologies and the training of medical professionals, and improve our capability to jointly address public health emergencies. We will provide medical assistance and emergency medical aid to relevant countries, and carry out practical cooperation in maternal and child health, disability rehabilitation, and major infectious diseases including

AIDS, tuberculosis and malaria. We will also expand cooperation on traditional medicine.

We should increase our cooperation in science and technology, establish joint labs (or research centers), international technology transfer centers and maritime cooperation centers, promote sci-tech personnel exchanges, cooperate in tackling key sci-tech problems, and work together to improve sci-tech innovation capability.

We should integrate existing resources to expand and advance practical cooperation between countries along the Belt and Road on youth employment, entrepreneurship training, vocational skill development, social security management, public administration and management and in other areas of common interest.

We should give full play to the bridging role of communication between political parties and parliaments, and promote friendly exchanges between legislative bodies, major political parties and political organizations of countries along the Belt and Road. We should carry out exchanges and cooperation among cities, encourage major cities in these countries to become sister cities, focus on promoting practical cooperation, particularly cultural and people-to-people exchanges, and create more lively examples of cooperation. We welcome the think tanks in the countries along the Belt and Road to jointly conduct research and hold forums.

We should increase exchanges and cooperation between non-governmental organizations of countries along the Belt and Road, organize public interest activities concerning education, health care, poverty reduction, biodiversity and ecological protection for the benefit of the general public, and improve the production and living conditions of poverty-stricken areas along the Belt and Road. We should enhance international exchanges and cooperation on culture and media, and leverage the positive role of the Internet and new media tools to foster harmonious and friendly cultural environment and public opinion.

V. Cooperation Mechanisms

The world economic integration is accelerating and regional cooperation is on the upswing. China will take full advantage of the existing bilateral and multilateral cooperation mechanisms to push forward the building of the Belt and Road and to promote the development of regional cooperation.

We should strengthen bilateral cooperation, and promote comprehensive development of bilateral relations through multi-level and multi-channel communication and consultation. We should encourage the signing of cooperation MOUs or plans, and develop a number of bilateral cooperation pilot projects. We should establish and improve bilateral joint working mechanisms, and draw up

implementation plans and roadmaps for advancing the Belt and Road Initiative. In addition, we should give full play to the existing bilateral mechanisms such as joint committee, mixed committee, coordinating committee, steering committee and management committee to coordinate and promote the implementation of cooperation projects.

We should enhance the role of multilateral cooperation mechanisms, make full use of existing mechanisms such as the Shanghai Cooperation Organization (SCO), ASEAN Plus China (10+1), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Asia-Europe Meeting (ASEM), Asia Cooperation Dialogue (ACD), Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA), China-Arab States Cooperation Forum (CASCF), China-Gulf Cooperation Council Strategic Dialogue, Greater Mekong Sub-region (GMS) Economic Cooperation, and Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) to strengthen communication with relevant countries, and attract more countries and regions to participate in the Belt and Road Initiative.

We should continue to encourage the constructive role of the international forums and exhibitions at regional and sub-regional levels hosted by countries along the Belt and Road, as well as such platforms as Boao Forum for Asia, China-ASEAN Expo, China-Eurasia Expo, Euro-Asia Economic Forum, China International Fair for Investment and Trade, China-South Asia Expo, China-Arab States Expo, Western China International Fair, China-Russia Expo, and Qianhai Cooperation Forum. We should support the local authorities and general public of countries along the Belt and Road to explore the historical and cultural heritage of the Belt and Road, jointly hold investment, trade and cultural exchange activities, and ensure the success of the Silk Road (Dunhuang) International Culture Expo, Silk Road International Film Festival and Silk Road International Book Fair. We propose to set up an international summit forum on the Belt and Road Initiative.

VI. China's Regions in

Pursuing Opening-Up

In advancing the Belt and Road Initiative, China will fully leverage the comparative advantages of its various regions, adopt a proactive strategy of further opening-up, strengthen interaction and cooperation among the eastern, western and central regions, and comprehensively improve the openness of the Chinese economy.

Northwestern and northeastern regions. We should make good use of Xinjiang's geographic advantages and its role as a window of westward opening-up to deepen communication and cooperation with Central, South and West Asian countries, make it a key transportation, trade, logistics, culture, science and education center, and a core area on the Silk Road Economic Belt. We should give full scope to the economic and cultural strengths of Shaanxi and Gansu provinces

and the ethnic and cultural advantages of the Ningxia Hui Autonomous Region and Qinghai Province, build Xi'an into a new focus of reform and opening-up in China's interior, speed up the development and opening-up of cities such as Lanzhou and Xining, and advance the building of the Ningxia Inland Opening-up Pilot Economic Zone with the goal of creating strategic channels, trade and logistics hubs and key bases for industrial and cultural exchanges opening to Central, South and West Asian countries. We should give full play to Inner Mongolia's proximity to Mongolia and Russia, improve the railway links connecting Heilongjiang Province with Russia and the regional railway network, strengthen cooperation between China's Heilongjiang, Jilin and Liaoning provinces and Russia's Far East region on sea-land multi-modal transport, and advance the construction of an Eurasian high-speed transport corridor linking Beijing and Moscow with the goal of building key windows opening to the north.

Southwestern region. We should give full play to the unique advantage of Guangxi Zhuang Autonomous Region as a neighbor of ASEAN countries, speed up the opening-up and development of the Beibu Gulf Economic Zone and the Pearl River-Xijiang Economic Zone, build an international corridor opening to the ASEAN region, create new strategic anchors for the opening-up and development of the southwest and mid-south regions of China, and form an important gateway connecting the Silk Road Economic Belt and the 21st-Century Maritime Silk Road. We should make good use of the geographic advantage of Yunnan Province, advance the construction of an international transport corridor connecting China with neighboring countries, develop a new highlight of economic cooperation in the Greater Mekong Sub-region, and make the region a pivot of China's opening-up to South and Southeast Asia. We should promote the border trade and tourism and culture cooperation between Tibet Autonomous Region and neighboring countries such as Nepal.

Coastal regions, and Hong Kong, Macao and Taiwan. We should leverage the strengths of the Yangtze River Delta, Pearl River Delta, west coast of the Taiwan Straits, Bohai Rim, and other areas with economic zones boasting a high level of openness, robust economic strengths and strong catalytic role, speed up the development of the China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, and support Fujian Province in becoming a core area of the 21st-Century Maritime Silk Road. We should give full scope to the role of Qianhai (Shenzhen), Nansha (Guangzhou), Hengqin (Zhuhai) and Pingtan (Fujian) in opening-up and cooperation, deepen their cooperation with Hong Kong, Macao and Taiwan, and help to build the Guangdong-Hong Kong-Macao Big Bay Area. We should promote the development of the Zhejiang Marine Economy Development Demonstration Zone, Fujian Marine Economic Pilot Zone and Zhoushan Archipelago New Area, and further open Hainan Province as an international tourism island. We should strengthen the port construction of coastal cities such as Shanghai, Tianjin, Ningbo-Zhoushan, Guangzhou, Shenzhen, Zhanjiang, Shantou, Qingdao, Yantai, Dalian, Fuzhou, Xiamen, Quanzhou, Haikou and Sanya, and strengthen the functions of international hub airports such as Shanghai and Guangzhou. We

should use opening-up to motivate these areas to carry out deeper reform, create new systems and mechanisms of open economy, step up scientific and technological innovation, develop new advantages for participating in and leading international cooperation and competition, and become the pace-setter and main force in the Belt and Road Initiative, particularly the building of the 21st-Century Maritime Silk Road. We should leverage the unique role of overseas Chinese and the Hong Kong and Macao Special Administrative Regions, and encourage them to participate in and contribute to the Belt and Road Initiative. We should also make proper arrangements for the Taiwan region to be part of this effort.

Inland regions. We should make use of the advantages of inland regions, including a vast landmass, rich human resources and a strong industrial foundation, focus on such key regions as the city clusters along the middle reaches of the Yangtze River, around Chengdu and Chongqing, in central Henan Province, around Hohhot, Baotou, Erdos and Yulin, and around Harbin and Changchun to propel regional interaction and cooperation and industrial concentration. We should build Chongqing into an important pivot for developing and opening up the western region, and make Chengdu, Zhengzhou, Wuhan, Changsha, Nanchang and Hefei leading areas of opening-up in the inland regions. We should accelerate cooperation between regions on the upper and middle reaches of the Yangtze River and their counterparts along Russia's Volga River. We should set up coordination mechanisms in terms of railway transport and port customs clearance for the China-Europe corridor, cultivate the brand of "China-Europe freight trains," and construct a cross-border transport corridor connecting the eastern, central and western regions. We should support inland cities such as Zhengzhou and Xi'an in building airports and international land ports, strengthen customs clearance cooperation between inland ports and ports in the coastal and border regions, and launch pilot e-commerce services for cross-border trade. We should optimize the layout of special customs oversight areas, develop new models of processing trade, and deepen industrial cooperation with countries along the Belt and Road.

VII. China in Action

For more than a year, the Chinese government has been actively promoting the building of the Belt and Road, enhancing communication and consultation and advancing practical cooperation with countries along the Belt and Road, and introduced a series of policies and measures for early outcomes.

High-level guidance and facilitation. President Xi Jinping and Premier Li Keqiang have visited over 20 countries, attended the Dialogue on Strengthening Connectivity Partnership and the sixth ministerial conference of the China-Arab States Cooperation Forum, and met with leaders of relevant countries to discuss bilateral relations and regional development issues. They have used these opportunities to explain the rich contents and positive implications of the Belt and

Road Initiative, and their efforts have helped bring about a broad consensus on the Belt and Road Initiative.

Signing cooperation framework. China has signed MOUs of cooperation on the joint development of the Belt and Road with some countries, and on regional cooperation and border cooperation and mid- and long-term development plans for economic and trade cooperation with some neighboring countries. It has proposed outlines of regional cooperation plans with some adjacent countries.

Promoting project cooperation. China has enhanced communication and consultation with countries along the Belt and Road, and promoted a number of key cooperation projects in the fields of infrastructure connectivity, industrial investment, resource development, economic and trade cooperation, financial cooperation, cultural exchanges, ecological protection and maritime cooperation where the conditions are right.

Improving policies and measures. The Chinese government will integrate its domestic resources to provide stronger policy support for the Initiative. It will facilitate the establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank. China has proposed the Silk Road Fund, and the investment function of the China-Eurasia Economic Cooperation Fund will be reinforced. We will encourage bank card clearing institutions to conduct cross-border clearing operations, and payment institutions to conduct cross-border payment business. We will actively promote investment and trade facilitation, and accelerate the reform of integrated regional customs clearance.

Boosting the role of cooperation platforms. A number of international summits, forums, seminars and expos on the theme of the Belt and Road Initiative have been held, which have played an important role in increasing mutual understanding, reaching consensus and deepening cooperation.

VIII. Embracing a Brighter

Future Together

Though proposed by China, the Belt and Road Initiative is a common aspiration of all countries along their routes. China is ready to conduct equal-footed consultation with all countries along the Belt and Road to seize the opportunity provided by the Initiative, promote opening-up, communication and integration among countries in a larger scope, with higher standards and at deeper levels, while giving consideration to the interests and aspirations of all parties. The development of the Belt and Road is open and inclusive, and we welcome the active participation of all countries and international and regional organizations in this Initiative.

The development of the Belt and Road should mainly be conducted through policy communication and objectives coordination. It is a pluralistic and open process of cooperation which can be highly flexible, and does not seek conformity. China will join other countries along the Belt and Road to substantiate and improve the content and mode of the Belt and Road cooperation, work out relevant timetables and roadmaps, and align national development programs and regional cooperation plans.

China will work with countries along the Belt and Road to carry out joint research, forums and fairs, personnel training, exchanges and visits under the framework of existing bilateral, multilateral, regional and sub-regional cooperation mechanisms, so that they will gain a better understanding and recognition of the contents, objectives and tasks of the Belt and Road Initiative.

China will work with countries along the Belt and Road to steadily advance demonstration projects, jointly identify programs that accommodate bilateral and multilateral interests, and accelerate the launching of programs that are agreed upon by parties and ready for implementation, so as to ensure early harvest.

The Belt and Road cooperation features mutual respect and trust, mutual benefit and win-win cooperation, and mutual learning between civilizations. As long as all countries along the Belt and Road make concerted efforts to pursue our common goal, there will be bright prospects for the Silk Road Economic Belt and the 21st-Century Maritime Silk Road, and the people of countries along the Belt and Road can all benefit from this Initiative.